



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Singaraja
2025



Adi Purwoko

KEPALA KPKNL SINGARAJA

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Singaraja Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen KPKNL Singaraja dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan.

Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, sepanjang Tahun 2025 KPKNL Singaraja berfokus pada upaya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingan. Berbagai inovasi, evaluasi, perbaikan berkelanjutan, pelatihan, serta kegiatan monitoring telah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas setiap aspek pelayanan yang kami berikan.

Sejalan dengan visi untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, KPKNL Singaraja secara konsisten melakukan pemantauan, pencatatan, serta penyelesaian seluruh target kinerja dengan sebaik-baiknya. Dalam mendukung program prioritas pemerintah, KPKNL Singaraja turut berperan aktif dalam memfasilitasi pemanfaatan Barang Milik Negara secara optimal, termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pengelolaan aset yang tertib, legal, dan akuntabel.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan KPKNL Singaraja, mulai dari Kepala Kantor hingga para pelaksana, yang secara bersama-sama berkomitmen dalam memenuhi target kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025. Seluruh hasil pelaksanaan kinerja tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Singaraja Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Penyusunan LKj ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKj ini menjadi instrumen utama dalam penyampaian capaian kinerja KPKNL Singaraja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja telah

menerapkan sistem Balanced Scorecard (BSC) sebagai instrumen pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Singaraja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja antara KPKNL Singaraja dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LKj Tahun 2025 disusun berdasarkan capaian IKU berbasis BSC yang telah disepakati oleh seluruh jajaran subbagian dan seksi di lingkungan KPKNL Singaraja.

Berbagai capaian kinerja telah berhasil diraih sepanjang Tahun 2025 melalui pelaksanaan kegiatan secara optimal dan evaluasi yang berkelanjutan. Capaian tersebut patut disyukuri, sementara terhadap capaian yang belum optimal akan dilakukan evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas sumber daya secara konsisten, meliputi pengembangan SDM yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Melalui penyusunan LKj Tahun 2025 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan transparan mengenai kinerja KPKNL Singaraja, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi organisasi. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang menjadi motivasi bagi KPKNL Singaraja untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Santun, Akuntabel, Kolaborasi, Transparansi, Integritas), KPKNL Singaraja berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan publik.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan sinergi seluruh pihak, yaitu para pemangku kepentingan, mitra kerja, serta seluruh masyarakat yang selama ini berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan pelayanan KPKNL Singaraja. KPKNL Singaraja berharap agar kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik tersebut dapat terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pelaksanaan tugas pada Tahun 2026.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dedikasi, integritas, dan semangat kebersamaan seluruh pegawai merupakan modal utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi ke depan.

Memasuki Tahun 2026, KPKNL Singaraja berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dan lelang secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan dilandasi nilai-nilai Kementerian Keuangan serta semangat SAKTI, kami optimis dapat menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan kinerja yang semakin baik di Tahun 2026.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, bimbingan, dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kepala KPKNL Singaraja



Ditandatangani secara elektronik

Adi Purwoko

NIP 19791106 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

NKO KPKNL Singaraja 115,16%



Sepanjang Tahun 2025, KPKNL Singaraja berhasil merealisasikan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian yang melebihi atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga seluruh indikator memperoleh status "hijau." Capaian keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 115,16%, yang menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatatkan NKO sebesar 113,95%. Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang semakin optimal serta dedikasi dan konsistensi seluruh jajaran KPKNL Singaraja dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

KPKNL Singaraja, sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, serta mendukung perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KPKNL Singaraja telah menetapkan misi strategis yang mencakup pengelolaan dan pengamanan kekayaan negara, pengelolaan piutang negara, serta penyelenggaraan penilaian dan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), seluruh IKU yang ditargetkan pada Tahun 2025 berhasil direalisasikan dengan baik, yang membuktikan komitmen organisasi dalam mencapai sasaran strategis.

Selain itu, pada Tahun 2025 KPKNL Singaraja turut berperan aktif dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara secara tertib, legal, dan akuntabel, guna mendukung penyediaan infrastruktur pendukung program tersebut.

Meskipun demikian, KPKNL Singaraja tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi lintas instansi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah-langkah strategis terus dilakukan melalui penguatan kompetensi SDM, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	13
C. SISTEMATIKA.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. PERENCANAAN STRATEGIS	20
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	21
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. REALISASI ANGGARAN	94
C. KINERJA LAINNYA.....	97
BAB IV PENUTUP	106
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai KPKNL Singaraja Berdasarkan Jabatan Struktural	16
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.....	23
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal.....	23
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....	24
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Penerapan tata kelola aset yang efektif.....	24
Tabel 2. 5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	24
Tabel 2. 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	24
Tabel 2. 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	25
Tabel 2. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	25
Tabel 2. 9 Perubahan Indikator Kinerja Utama.....	25
Tabel 2. 10 Perubahan Rincian Target Kinerja	25
Tabel 2. 11 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	27
Tabel 2. 12 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	27
Tabel 2. 13 Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif.....	27
Tabel 2. 14 Penerapan tata kelola aset yang efektif.....	27
Tabel 2. 15 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.....	28
Tabel 2. 16 Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	28
Tabel 2. 17 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.....	28
Tabel 2. 18 Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.....	28
Tabel 3. 1 Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Tahun 2025.....	94
Tabel 3. 2 Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Periode 2021 s.d. 2025.....	95
Tabel 3. 3 Rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA KPKNL Singaraja per kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	16
Grafik 3. 1 Grafik NKO KPKNL Singaraja 2021-2025	32
Grafik 3. 2 Realisasi PNBP Tahun 2024.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	14
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	15
Gambar 2. 1 Peta Strategi Tahun 2025.....	22
Gambar 2. 2 Peta Strategi 2026	26

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Singaraja sejak bulan Januari sampai Desember Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu Kepala Kantor, satu Subbagian, empat Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.



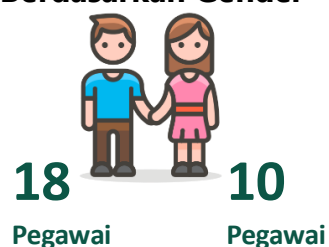
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singaraja didukung oleh 28 orang pegawai yang memiliki beragam latar belakang keahlian, antara lain di bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, serta bidang lainnya. Berdasarkan komposisi gender, pegawai KPKNL Singaraja terdiri atas 18 pegawai pria dan 10 pegawai wanita.

Jumlah Pegawai



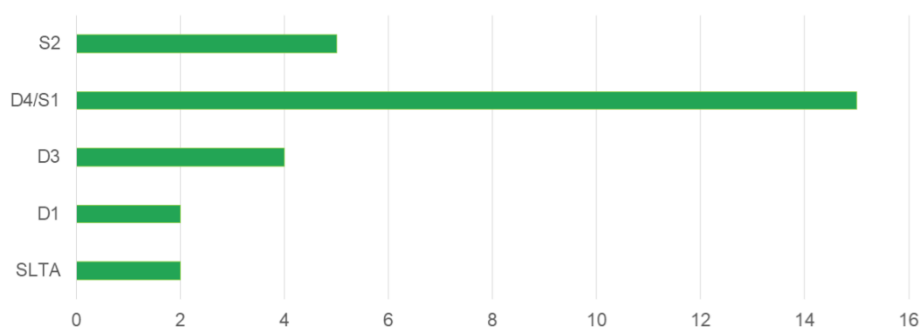
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai KPKNL Singaraja berpendidikan Diploma IV/Strata 1 (D4/S1) sebanyak 15 pegawai. Selebihnya terdiri atas pegawai berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 5 pegawai, Diploma III (D3) sebanyak 6 pegawai, Diploma I (D1) sebanyak 2 pegawai, serta Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 2 pegawai. Keberagaman latar belakang pendidikan tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

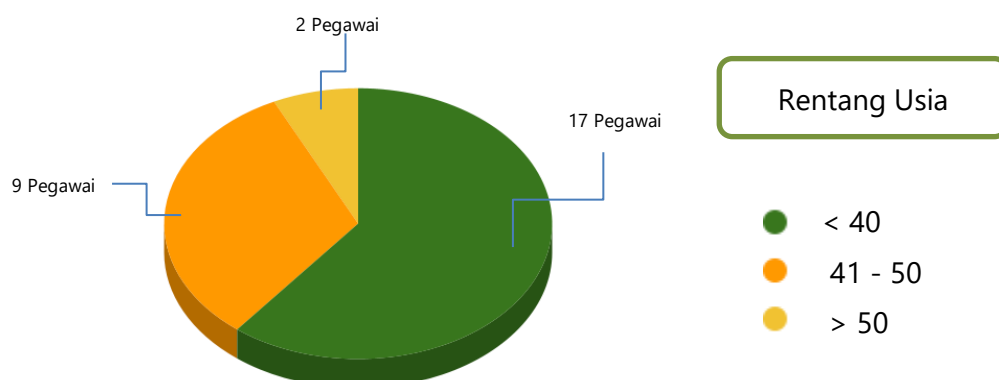
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Ditinjau dari sisi usia, sebagian besar pegawai KPKNL Singaraja berada pada usia produktif, yaitu di bawah 40 tahun sebanyak 17 orang. Adapun pegawai yang berusia 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 9 orang, sedangkan pegawai yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 2 orang. Komposisi usia tersebut menunjukkan dominasi pegawai usia produktif dalam struktur sumber daya manusia KPKNL Singaraja.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Selanjutnya, komposisi pegawai KPKNL Singaraja berdasarkan jabatan struktural disajikan pada tabel berikut. Struktur jabatan tersebut menjadi dasar pembagian peran dan tanggung jawab pegawai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singaraja.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml Peg	Eselon			
			II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	6	-	-	1	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	-	1	3
4	Seksi Piutang Negara	2	-	-	1	1
5	Seksi Hukum dan Informasi	4	-	-	1	3
6	Seksi Kepatuhan Internal	3	-	-	1	2
7	Kelompok Jabatan Fungsional	8	-	-	-	-
	Total	28	-	1	5	14

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai KPKNL Singaraja Berdasarkan Jabatan Struktural

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

5. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan sistematika laporan.

6. Bab II. Perencanaan Kinerja


Bagian ini menguraikan tentang ringkasan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

7. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

8. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 mencakup empat pilar utama yang didukung strategi kebijakan terperinci. Sasaran pertama adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan, dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif melalui transformasi regulasi, probitas, dan layanan yang meliputi penguatan regulasi bidang kekayaan negara dan lelang, penyusunan roadmap riset dan pengembangan (R&D) penilaian, optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), implementasi sistem informasi nilai properti, bisnis, dan sumber daya alam (SDA), penguatan data properti secara akurat, serta digitalisasi pelayanan lelang; diikuti pengelolaan kekayaan negara yang produktif dan perbendaharaan modern melalui penguatan sinergi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk program strategis Presiden, optimalisasi pengelolaan piutang negara pada kementerian/lembaga (K/L), penguatan sinergi penanganan piutang negara, pengukuran efektivitas investasi pemerintah, dan penguatan pengelolaan aset serta dana jangka panjang oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sasaran kedua adalah penguatan tata kelola melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan internal, koordinasi lintas unit dan stakeholder, budaya integritas dan antikorupsi, sistem pengendalian internal, audit internal dan evaluasi, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Sasaran ketiga adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi melalui penguatan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi informasi (TI) dan data center, literasi digital dan cybersecurity, pengelolaan pengetahuan, kolaborasi dan networking, serta transformasi digital. Sasaran keempat adalah penguatan pelayanan publik melalui penguatan pelayanan prima berbasis digital, sosialisasi dan edukasi masyarakat, partnership dengan stakeholder, inovasi pelayanan, feedback dan pengaduan masyarakat, serta branding dan komunikasi publik.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis DJKN 2025-2029



Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh DJKN berperan sebagai pedoman yang mengarahkan setiap langkah dan tindakan unit vertikal, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, agar selaras dengan sasaran strategis Kementerian Keuangan.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2025 KPKNL Singaraja menetapkan delapan sasaran strategis yang akan dicapai :

- 1) Pengelolaan lelang yang berkualitas, adaptif, dan terpercaya.
- 2) Pengelolaan kekayaan negara dan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal.
- 3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan.
- 4) Kebutuhan pegawai aset yang efektif.
- 5) Pengelolaan pegawai, regulasi, dan layanan yang profesional dan produktif.
- 6) Pengelolaan kekayaan dan Barang Milik Negara (BMN) yang adaptif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif.
- 7) Komunikasi publik yang efektif.
- 8) Pengelolaan internal serta manajemen risiko yang efektif.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja Merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Prosedur Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memastikan pencapaian sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Singaraja harus menjadi pedoman dalam merumuskan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, sasaran strategis untuk tahun 2025 telah ditentukan dan dikelompokkan dalam Peta Strategi KPKNL Singaraja.

Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif *Stakeholder* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b. Perspektif *Customer*

Perspektif *Customer* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

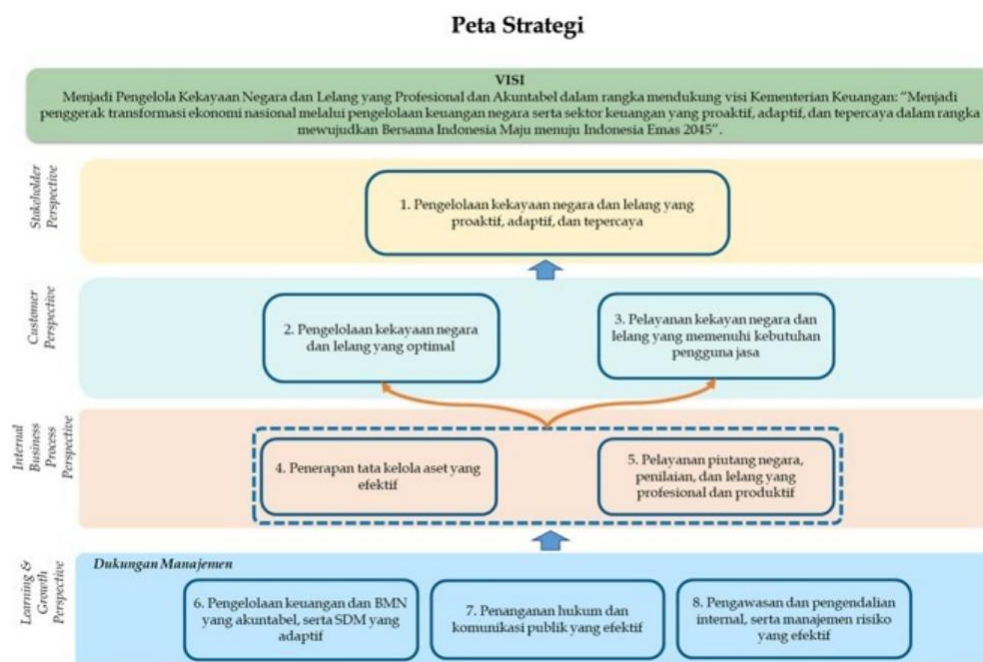
c. Perspektif *Internal Process*

Perspektif *Internal Process* mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Setiap perspektif pada peta strategi, terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS). SS merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Peta Strategi KPKNL Singaraja Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis. Peta Strategi KPKNL Singaraja sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Tahun 2025

KPKNL Singaraja mempunyai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2025 KPKNL Singaraja menetapkan delapan sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Pengelolaan lelang yang berkualitas, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan.
4. Kebutuhan pegawai aset yang efektif.
5. Pengelolaan pegawai, regulasi, dan layanan yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan kekayaan dan Barang Milik Negara (BMN) yang adaptif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif.
7. Komunikasi publik yang efektif.
8. Pengelolaan internal serta manajemen risiko yang efektif.

Sasaran-sasaran ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih luas, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan besar KPKNL Singaraja dalam mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Singaraja mencapai 8 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Kode	Indikator Kinerja	Target
1a-CP	Indeks integritas	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,1 M)

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp131 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp160 Jt)

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal

3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Kode	Indikator Kinerja	Target
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

4) Penerapan tata kelola aset yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatan	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Penerapan tata kelola aset yang efektif

5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Kode	Indikator Kinerja	Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%

Tabel 2. 5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Kode	Indikator Kinerja	Target
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%

Tabel 2. 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80

Tabel 2. 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Tabel 2. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-2/WKN.14/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,1 M)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp8,0 M)
2.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100% (8)	5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100% (11,6)

Tabel 2. 9 Perubahan Indikator Kinerja Utama

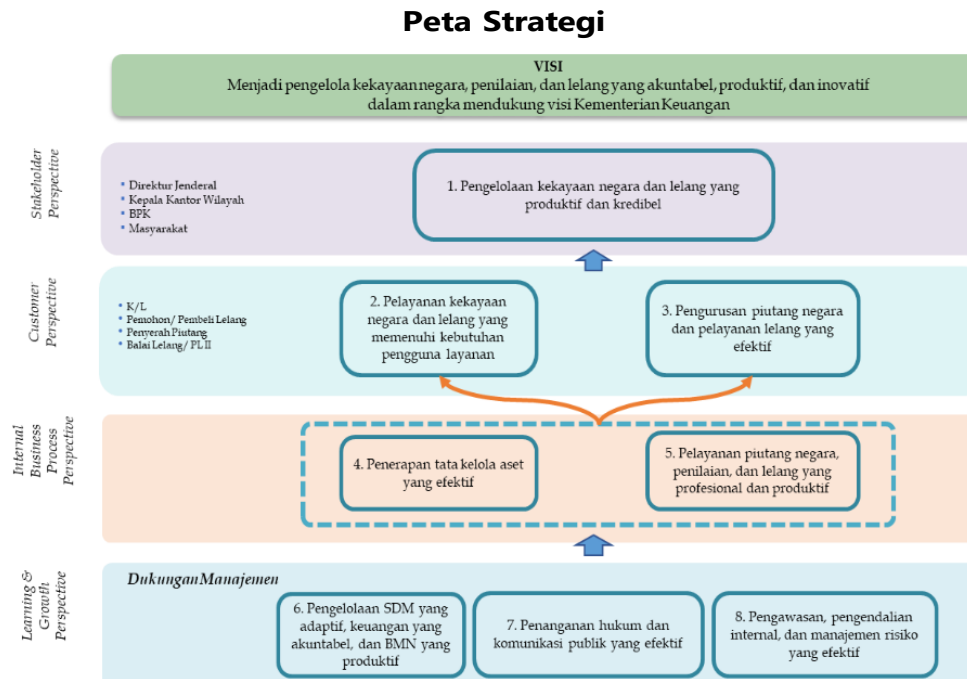
B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum								Menjadi							
		Target								Target							
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y		
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,1 M)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp8,0 M)
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (8)	5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (11,6)

Tabel 2. 10 Perubahan Rincian Target Kinerja

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Peta Strategi KPKNL Singaraja Tahun 2026 memuat 8 sasaran strategis. Peta Strategi KPKNL Singaraja sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Peta Strategi 2026

KPKNL Singaraja mempunyai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2026 KPKNL Singaraja menetapkan delapan sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan
3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Sasaran-sasaran ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih luas, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan besar KPKNL Singaraja dalam mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Singaraja mencapai 8 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel

Kode	Indikator Kinerja	Target
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%

Tabel 2. 11 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel

2) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan

Kode	Indikator Kinerja	Target
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%

Tabel 2. 12 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan

3) Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100%

Tabel 2. 13 Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif

4) Penerapan tata kelola aset yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

Tabel 2. 14 Penerapan tata kelola aset yang efektif

5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Kode	Indikator Kinerja	Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%

Tabel 2. 15 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

6) Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif

Kode	Indikator Kinerja	Target
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80

Tabel 2. 16 Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif

7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80

Tabel 2. 17 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

8) Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target
8a-N	Indeks integritas organisasi	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Tabel 2. 18 Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja tahun 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. KPKNL Singaraja sebagian besar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singaraja adalah sebesar 115,16%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

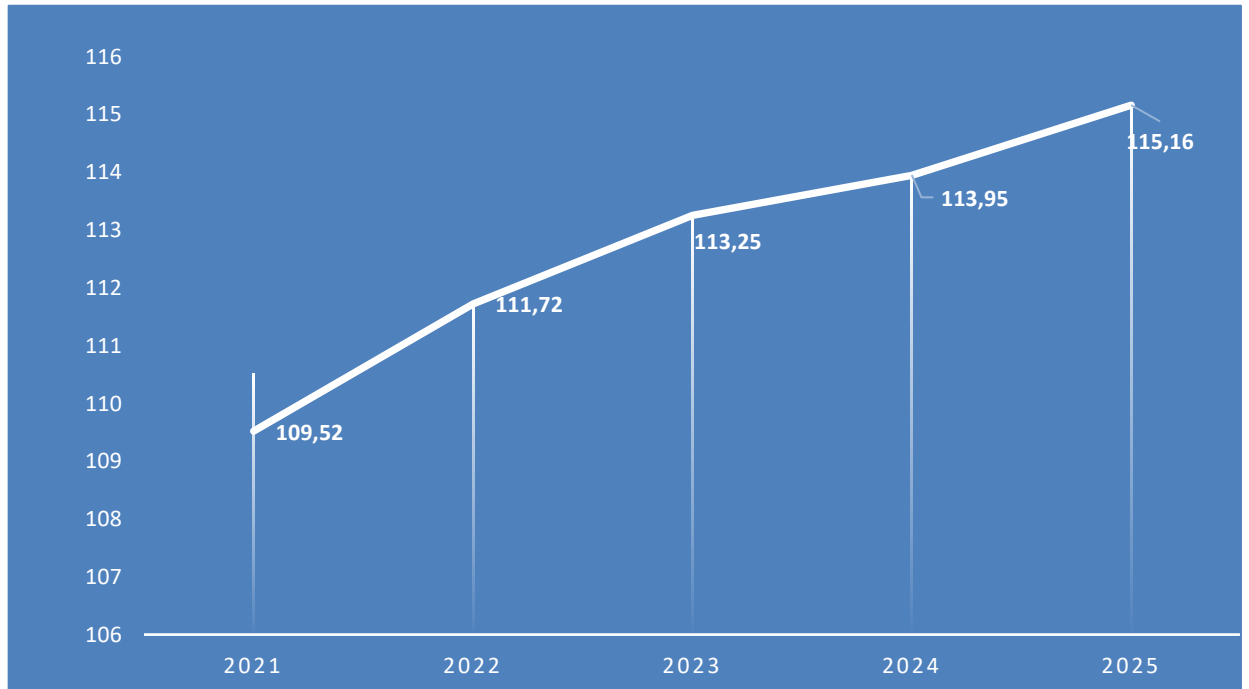


Gambar 3. 1 Gambar NKO KPKNL Singaraja Tahun 2025

NKO ini dirangkum dari empat perspektif Balanced Scorecard dengan bobot proporsional: Stakeholder Perspective (30%, capaian 111,53), Internal Process Perspective (25%, capaian 115,56), Customer Perspective (20%, capaian 116,96), dan Learning & Growth Perspective (25%, capaian 117,76), yang secara keseluruhan mencerminkan kinerja optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan aset negara serta lelang.

Selama periode 2021-2025, nilai NKO KPKNL Singaraja mencerminkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan, dimulai dari 109,52 pada tahun 2021, naik menjadi 111,72 pada 2022 kemudian 113,25 pada 2023 113,95 pada 2024 dan mencapai puncak tertinggi sebesar 115,16 pada 2025. Pencapaian ini tidak hanya menegaskan efisiensi operasional dalam pengelolaan aset negara dan lelang, tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk capaian 19 IKU berstatus Hijau di tahun 2025, yang melambangkan kinerja optimal sesuai standar DJKN Kementerian Keuangan.

NKO KPKNL Singaraja 2021 s.d. 2025



Grafik 3. 1 Grafik NKO KPKNL Singaraja 2021-2025

Adapun penjelasan capaian Indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG PROAKTIF, ADAPTIF, DAN TERPERCAYA

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercapainya kondisi sasaran strategis di indikasikan dari nilai indeks integritas organisasi, indeks survey kepuasan pengguna layanan dan stakeholder, kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta efektivitas dari kerja sama keuangan internasional. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<u>Indeks Integritas</u>	89,37	94,12%	105,32%
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	134,03%	134,03%

1) Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

- a) Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- b) Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- a) Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain;
- b) Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I;
- c) Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi;
- d) Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode;
- e) Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Trajectory IKU Indeks Integritas KPKNL Singaraja tahun 2025

KPKNL Singaraja	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37	Max /
Realisasi	100	100	100	100	100	94,12	94,12	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	105,32	105,32	

Komponen penilaian integritas meliputi Internal, Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran, Eksternal, Transparansi, dan Integritas Pegawai. Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi).

Faktor Koreksi nya antara lain adanya Keterjadian OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH. Sedangkan Apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI atau Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon I. Faktor koreksi dan apresiasi menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.

IKU ini digunakan KPKNL Singaraja sejak tahun 2023. Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2025 sebesar 105.29 naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 92.44. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh puasnya pengguna layanan atas kualitas layanan berintegritas yang dirasakannya selama Tahun 2025.

Realisasi IKU 2021-2025

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105.29
2024	89.17	92	92	92	-	92.44
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90.5	90.5	90.5	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Edukasi Publik mengusung tema integritas setiap triwulan.
- b) Menyampaikan informasi pelaksanaan *Focus Group Discussion*.
- c) Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SP.
- d) Melaksanakan rangkaian aksi pencegahan korupsi secara masif yang dilaksanakan sebagai wujud kolaborasi dan aksi nyata seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit DJKN. melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal maupun eksternal dengan berbagai tema yang telah ditentukan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	26,790,000.00	26,269,396.00	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya
2	Komunikasi Publik Kehumasan	19,092,000.00	6,458,597.00	Telah dilaksanakan Edukasi Publik setiap triwulan menyisipkan tema Integritas

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Walaupun demikian, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, misalnya kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas. Kendala teknis lainnya seperti survei yang dikirimkan langsung oleh KPK kepada target survei melalui whatsapp maupun melalui surel dan monitoring disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini KPKNL tidak memiliki tools untuk memonitoring secara langsung apakah survei sudah dilakukan pengisian oleh target survei.

Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain :

- Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
- Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi;
- Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Singaraja secara bulanan kepada Kepala KPKNL Singaraja.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal;
- Memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Edukasi Publik mengusung tema integritas setiap triwulan.

2) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut:

a. PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

- Penggunaan BMN (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- Pemanfaatan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Pemindahtanganan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Denda yang berasal dari Pengelolaan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Penyelesaian klaim Asuransi BMN (oleh KPKNL di lokasi terdampak);
- Penjualan Barang Rampasan/Tegahan;
- Pendapatan BLU lainnya yang bersumber dari BMN (tidak termasuk layanan yang diberikan BLU) yang telah diverifikasi oleh Kanwil DJKN.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- Biaya permohonan lelang;
- Uang jaminan pembeli wanprestasi;
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2025 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	158,49	237,40	237,40	187,79	187,79	134,03	134,03	TLK
Capaian	158,49	237,40	237,40	187,79	187,79	134,03	139.39	

Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Seksi/Bidang	Target		Realisasi 2024	Indeks Capaian Tanpa Batas
		%	Raw		
1	Pengelola Kekayaan Negara	100	3.651.000.000	3.874.545.551	106,12%
2	Piutang Negara	100	12.884.000	16.486.691	157,11%
3	Lelang	100	3,300,000,000	6.938.086.850	127,96%
Total PNB		100	8.079.859.000	10.829.119.092	134,03%

Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar **Rp10.829.119.092,00** dari target 2025 sebesar Rp8.079.859.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 134,03%. Data capaian realisasi PNB pada KPKNL Singaraja selama 5 tahun dari tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :



Grafik 3. 2 Realisasi PNB Tahun 2024

Berikut tabel Realisasi IKU 2021-2025

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	134.03
2024	100	100	100	100	-	139.39
2023	100	100	100	100	-	134.87
2022	100	100	100	100	-	107.67
2021	100	100	100	100	-	115.02

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Menetapkan usulan persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN;
- b) Berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN;
- c) Menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
- d) Melakukan penagihan langsung kepada Debitur secara tatap muka;
- e) Melakukan penelitian lapangan guna pemantauan progress penyelesaian piutang secara berkala kepada setiap debitur;
- f) Memprioritaskan Penetapan jadwal lelang ulang yang berpotensi laku;
- g) Melakukan penggalan potensi lelang noneksekusi sukarela (UMKM);
- h) Meminimalisir potensi pembatalan lelang dari pihak penjual dengan memberikan edukasi lelang;
- i) Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	108,663,000.00	93,730,000.00	Telah dihasilkan 45 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	22,973,000.00	0	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
3	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	52,120,000.00	48,475,270.00	Telah dihasilkan 60 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
4	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8,244,000.00	0	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
5	Risalah Lelang	21,600,000.00	20,840,000.00	Telah dihasilkan 150 Risalah Lelang.
6	Penggalian Potensi Lelang	35,856,000.00	12,332,418.00	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
7	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3,223,000.00	0	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

- a) Rendahnya kesadaran debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
- b) Umur piutang terlalu lama sehingga menimbulkan permasalahan seperti debitur tidak dapat lagi ditemukan bahkan sudah meninggal dunia di sisi lain ahli warisnya tidak mengakui adanya piutang;
- c) Kemampuan debitur untuk menyelesaikan utang relatif rendah;
- d) Transisi Aplikasi Lelang Versi 2;
- e) Tingkat Pemahaman satker K/L terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;
- f) PIC pengelolaan aset satker K/L kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN;
- g) Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

- a) Koordinasi dengan kelurahan atau kantor desa setempat guna penelusuran debitur;
- b) Melakukan sosialisasi melalui diskusi secara personal kepada setiap debitur terkait kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
- c) Menginformasikan dan mendorong penggunaan fasilitas keringanan utang kepada debitur yang tidak memiliki kemampuan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.06/2024;
- d) Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;

- e) Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;
- f) Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya.

Dengan mempertimbangkan kendala dan permasalahan yang ada, dapat disusun rencana aksi strategis untuk mencapai target IKU pada tahun mendatang, antara lain: Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN.

1. Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker;
2. Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
3. Melakukan panggilan, penagihan langsung dan penelitian lapangan;
4. Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi langsung;
5. Penyampaian Surat Paksa;
6. Melakukan Penyitaan & Lelang Barang Jaminan;
7. Penggalan Potensi Lelang kepada stake holder.

2. SASARAN STRATEGIS : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	50	60	60	80	50	100	100	Max /
Realisasi	66,67%	66,67%	66,67%	90,59%	90,59%	103,33%	103,33%	TLK
Capaian	133,33%	111,11 %	111,11 %	113,24%	113,24%	103,33%	103,33%	

Indikator Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	103,33%	103,33%
2	Persentase realisasi pokok lelang	100%	134,05%	134,05%
3	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	122,69%	122,69%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Optimalisasi pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L melalui implementasi PMK Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan.

adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per per Satuan Kerja. Bentuk optimalisasi adalah penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN.

Trajectory IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara KPKNL Singaraja tahun 2024 adalah:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	103,33
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Hanya 2025 yang memiliki data, menunjukkan pencapaian melebihi target di semua kategori (103.3% pada realisasi keseluruhan). Pencapaian 103.3% pada 2025 berarti KPKNL ini melampaui target nasional dan Renstra, menandakan kinerja optimal dalam pengelolaan kekayaan negara seperti aset BMN (Barang Milik Negara), piutang negara, atau lelang—sesuai fungsi KPKNL di bawah DJKN Kemenkeu.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	14,720,000.00	13,480,000.00	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 106 rekomendasi kebijakan dari target 106 rekomendasi kebijakan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

2) Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian. IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

KPKNL Singaraja	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP <u>Persentase Realisasi Pokok Lelang</u>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	189,96	250,67	250,67	184,96	184,96	134,05	134,05	TLK
Capaian	189,96	250,67	250,67	184,96	184,96	134,05	134,05	

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp131.000.000.000,00.- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp175.611.020.119,00,-. Adapun uraian terhadap capaian pokok lelang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	131.000.000.000,00	138.760.447.819,00	134,05%
2	<u>Pokok Lelang</u> <u>Pegadaian</u>	-	36.850.572.300,00	-
Jumlah Pokok Lelang		131.000.000.000,00	175.611.020.119,00	134,05%

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	134,05
2024	100	-	100	100	-	114.79
2023	100	-	100	100	-	87.54
2022	100	-	100	100	-	105.99
2021	100	-	100	100	-	181.11

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Penggalan potensi lelang;
- b) Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang;
- c) Sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*;
- d) Berkoordinasi dengan perbankan khususnya Perbankan BUMN untuk segera memproses objek lelang yang telah terdata dalam daftar potensi objek lelang yang akan dimohonkan lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	21,600,000.00	20,840,000.00	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 150 Dokumen RL dari target 150
2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3,223,000.00	-	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
3	Penggalian Potensi Lelang	35,856,000.00	12,332,418.00	Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dimana capaian hasil lelangnya belum optimal karena dipengaruhi oleh budaya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Mitigasi risiko atas kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan lelang terkait aplikasi lelang versi 2.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

- a) Penggalian potensi lelang stakeholder;
- b) Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
- c) MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum

3) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e) Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
- f) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Terdapat adendum untuk penurunan outstanding piutang negara dengan target sebesar Rp160.000.000,00. Capaian penurunan outstanding Piutang Negara di Q4 2025 sebesar Rp196.308.319,00 atau sebesar 122,69% dari target.

KPKNL Singaraja	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	99,45	187,00	187,00	128,72	128,72	122,69	122,69	TLK
Capaian	99,45	187,00	187,00	128,72	128,72	122,69	122,69	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	122,69
2024	100	-	-	-	-	100,44
2023	100	-	-	-	-	121,31
2022	100	-	-	-	-	147,33
2021	100	-	-	-	-	77

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan outstanding Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 2.4% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan outstanding piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar untuk membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Singaraja;
3. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
4. Menginformasikan adanya Crash Program Keringanan Utang di tahun 2025 kepada debitur untuk melakukan pelunasan utang;
5. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT;
6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	52,120,000.00	48,475,270.00	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 60 surat keputusan dari target 60 surat keputusan
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8,244,000.00	-	Adanya efisiensi dan optimalisasi an

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara;
2. Piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan atau ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum;
3. Terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L;

4. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;
2. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Singaraja;
2. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara;
3. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
4. Mengoptimalkan fasilitas SLIK OJK pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

3. SASARAN STRATEGIS : PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA JASA

Tata Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dan ekspektasi pengguna jasa, serta memberikan keyakinan bahwa pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara optimal. Upaya tersebut diarahkan agar seluruh proses pengelolaan kekayaan negara dan lelang berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta selaras dengan kebutuhan dan harapan pengguna jasa.

Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang juga ditujukan untuk memenuhi standar kualitas layanan yang tinggi, melalui penerapan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas proses bisnis, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, kepastian, dan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan.

Melalui berbagai langkah perbaikan dan penguatan tersebut, pengelolaan kekayaan negara dan lelang diharapkan dapat terus meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya layanan kekayaan negara dan lelang yang profesional, andal, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	94.05	127.09
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	94.92	123.27

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Berdasarkan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DJKN, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan edukasi dan komunikasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman para pelaku proses bisnis di internal DJKN serta para pengguna layanan DJKN, sehingga berdampak pada peningkatan capaian kinerja secara umum.

Pada KPKNL Singaraja, IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu **Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang** serta **Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara**. Kedua komponen tersebut diarahkan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta pegawai internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan yang terkait dengan pengelolaan Kekayaan Negara, Lelang, dan Piutang Negara.

Dalam rangka memastikan ketercapaian indikator tersebut, KPKNL Singaraja telah melakukan cascading IKU secara berjenjang. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang diwajibkan untuk dicascade kepada seluruh Pejabat Fungsional Pelelang, sedangkan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara diwajibkan untuk dicascade kepada Kepala Seksi Piutang Negara. Melalui mekanisme cascading ini, diharapkan seluruh unit kerja dan pejabat terkait memiliki peran aktif dalam pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman stakeholders dan internal DJKN, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara, peningkatan kualitas layanan lelang, serta efektivitas pengelolaan Piutang Negara di wilayah kerja KPKNL Singaraja. Dengan demikian, IKU ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

KPKNL Singaraja	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max /
Realisasi	90	92.22	92.22	93.15	93.15	94.05	94.05	TLK
Capaian	121.62	124.62	124.62	125.87	125.87	127.09	127.09	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	94.05
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	90	-	-	-	-	95.26
2021	90	-	-	-	-	94.79

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder
- b) Melaksanakan kegiatan evaluasi edukasi dan komunikasi melalui kuesioner
- c) Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid dengan stakeholder

Dalam pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terdapat dua kendala utama yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan edukasi dan komunikasi dilakukan melalui daring, dan adanya perbedaan pemahaman antara KPKNL dengan stakeholder terkait prosedur, persyaratan dan dasar hukum Piutang Negara dan Lelang.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

- a) Mengadakan kegiatan Edukasi dan Komunikasi secara daring, mengingat adanya efisiensi anggaran KPKNL Singaraja;
- b) Melakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder.
- c) Melakukan sosialisasi terkait peraturan terkait kepada stekholder.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder
- b) Mengoptimalkan sosialisasi peraturan, khususnya apabila terdapat perbedaan ketentuan antara stekholder dan KPKNL
- c) Melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan secara triwulanan

2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Evaluasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN. Pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui survei kepuasan pengguna layanan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan dikoordinasikan oleh Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan KPKNL. Hasil survei tersebut diolah dan diukur melalui indeksasi terhadap beberapa komponen utama pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, serta produk layanan. Selain itu, survei juga mencakup penilaian terhadap kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta sarana pengaduan.

Pengukuran terhadap komponen-komponen tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi pengguna jasa terhadap kualitas layanan yang diterima. Hasil indeks kepuasan pengguna layanan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan, sekaligus sebagai dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

KPKNL Singaraja	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max /
Realisasi	93.06	95.03	95.03	94.89	94.89	94.92	94.92	TLK
Capaian	120.86	123.42	123.42	123.23	123.23	123.27	123.27	

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	-	-	-	-	94.92
2024	-	-	-	-	-	-
2023	100	-	-	-	-	121.57
2022	4,68	-	-	-	-	4,69
2021	4.68	-	-	-	-	4.68

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat secara Triwulanan
- b) Pelaksanaan permintaan pengisian E-SKPL kepada stakeholder secara triwulanan
- c) Peningkatan kualitas layanan pada Area Pelayanan Terpadu KPKNL Singaraja
- d) Optimalisasi kanal layanan digital berupa layanan Whatsapp Layanan, untuk mempermudah stakeholder menerima layanan
- e) Penguatan Budaya layanan prima untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada stakeholder

Adapun kendala dalam pelaksanaan IKU Kepuasan Pengguna Layanan adalah keterbatasan dalam penyebaran survei kepada stakeholder eksternal yang berada di luar kendali langsung KPKNL Singaraja. Kondisi tersebut memerlukan upaya tambahan dalam proses penyebaran dan pengumpulan respons survei agar dapat memperoleh jumlah dan kualitas hasil survei yang memadai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Standarisasi dan penguatan SOP Pelayanan sesuai KEP-40/KN/2024
- b) Peningkatan mekanisme pelayanan dan supervisi dari pimpinan
- c) Penyediaan kanal pengaduan dan umpan balik yang mudah bagi stakeholder
- d) Pemberian Pelayanan secara optimal dan profesional.

Adapun aksi untuk tahun mendatang adalah Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun anggaran berikutnya.

4. SASARAN STRATEGIS : PENERAPAN TATA KELOLA ASET YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Penerapan tata kelola aset yang efektif memerlukan kerangka kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian nilai optimal bagi kepentingan publik. Hal ini mencakup perencanaan yang matang dalam alokasi sumber daya, mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan, serta pengelolaan strategi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan negara. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi manajemen aset negara dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan, pemantauan, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola aset yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan daya guna aset dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	102.24%	102.24%
2	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	120%	120%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) **Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2025 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Kelompok 1/K1 (clean & clear): dengan output SHP elektronik, update dan validasi di SIMAN;
- b. Kelompok 2/K2 (not clean but clear): dengan output dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan;
- c. Kelompok 3/K3 (clean but not clear/not clean & not clear): dengan output Upaya pengosongan/penguasaan secara fisik oleh KL/satker (mediasi, gugatan, atau laporan ke APH);
- d. Kelompok 4/K4: dengan output Ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. update dan validasi di SIMAN.

KPKNL Singaraja	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	5	40	40	60	60	100	100	Max /
Realisasi	5.22	42.54	42.54	60.45	60.45	102.24	102.24	TLK
Capaian	104.48	106.34	106.34	100.75	100.75	102.24	102.24	

Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami trend peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan database BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan tools Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan tools Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah).

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	100	-	102.24
2024	100	-	100	100	-	100
2023	100	-	100	100	-	106.06
2022	100	-	100	-	-	123.38
2021	100	-	100	-	-	101.44

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta

rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN;
- b) Telah melakukan koordinasi dengan satuan kerja sebagaimana target serta kementerian terkait dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk solusi permasalahan;
- c) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satker dalam rangka percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikasi antara lain adanya efisiensi anggaran satker yang mengakibatkan sebagian anggaran diblokir hingga Triwulan III, sehingga menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan. Selain itu, terdapat beberapa dokumen pertanahan yang belum lengkap sesuai ketentuan Kantor Pertanahan, sehingga proses penyelesaian harus dilimpahkan dan dilanjutkan pada tahun berjalan. Kendala juga terjadi pada pencapaian target K1, yaitu belum tersedianya surat pelepasan hak dari pemerintah daerah atas objek tanah, sehingga dilakukan substitusi dengan aset lain yang memenuhi persyaratan dan dapat disertifikatkan guna menjaga keberlanjutan pencapaian target. Meskipun terdapat kendala pada kegiatan pensertifikasian, Namun Target sertifikasi tahun 2025 adalah 264 NUP yang terdiri dari 268 bidang, dengan 258 bidang merupakan target subordinasi dari KPKNL Denpasar sedangkan target KPKNL Singaraja Adalah sebanyak 10 bidang, dapat dicapai oleh KPKNL Singaraja.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

- a) Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
- b) Melakukan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN didampingi dengan kanwil
- c) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja sebagaimana target serta kementerian terkait dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk solusi permasalahan tersebut.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian terkait, Kanwil ATR/BPN serta Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
- b) Koordinasi intensif dengan satuan kerja dengan target terbesar agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi dapat dituntaskan, dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan.

2) Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan Indikator Kinerja yang muncul sejak Tahun 2020.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

KPKNL Singaraja	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	15	50	50	75	75	100	100	Max /
Realisasi	60	104.34	104.34	87.98	87.98	120	120	TLK
Capaian	400	208.68	208.68	117.30	117.30	120	120	

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021-2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	120
2024	100	-	100	-	-	120.59
2023	100	-	100	-	-	121.57
2022	100	-	100	-	-	100
2021	100	-	100	-	-	125.93

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Menyelesaikan evaluasi kinerja BMN pada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Singaraja;
- b) Menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja yang sudah dilakukan evaluasi kinerja BMN.
- c) Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, untuk melakukan crosscheck atas tambahan informasi yang dibutuhkan misalnya mencantuman kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

Pada dasarnya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang berarti karena pekerjaannya dominan berada di KPKNL Singaraja. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi teknis fisik, keberadaan dengan sekitar lingkungan sekitar obyek yang akan dievaluasi kinerja BMN-nya. Hal ini untuk dapat mengetahui potensi penggunaan masa depannya.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Melakukan penelitian awal atas objek BMN yang akan dievaluasi kinerjanya dengan mendatangi langsung seluruh objek, sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi dan penilaian kinerja BMN.

- b) Berkoordinasi secara intensif dengan para stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hasil evaluasi, sehingga rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.

IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan BMN dimanfaatkan secara optimal, legal, dan efisien dalam mendukung program prioritas Presiden. Melalui evaluasi kinerja, BMN yang belum optimal dapat dialihkan pemanfaatannya, termasuk melalui pengajuan izin pemanfaatan untuk dapur Makan Bergizi Gratis dan kantor SPPG di Polres Jemberana.

Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun anggaran berikutnya.
2. Perbaiki layanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Melakukan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satker Pengguna Barang.

5. SASARAN STRATEGIS : PELAYANAN PIUTANG NEGARA, PENILAIAN, DAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN PRODUKTIF

Pelaksanaan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang efektif mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam sasaran strategis ini, DJKN berkomitmen dalam mewujudkan:

- a. kepemilikan resmi dan kejelasan status hukum atas tanah negara melalui sertifikasi BMN berupa tanah yang disertipatkan dalam mencapai tertib hukum dan administrasi;
- b. pengurusan piutang negara melalui percepatan penyelesaian BKPN, restrukturisasi, serta proses hukum lainnya dalam mencapai saldo berkas kasus piutang negara yang minimal;
- c. efektivitas pelaksanaan layanan lelang dalam mendapatkan nilai yang optimal yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	128.45%	128.45%
2	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105.61%	150.87%
3	Persentase produktivitas lelang	80%	115.14%	143.93%

Uraian mengenai ketiga Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L/Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- a. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - 1) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - 2) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - 3) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- b. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - 1) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - 2) Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - 3) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

c. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)

- 1) Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
- 2) Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 8 (delapan) Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

KPKNL Singaraja	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	220	230	230	193.33	193.33	128.45	128.45	TLK
Capaian	220	230	230	193.33	193.33	128.45	128.45	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan Desember 2025, capaian penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercatat sebanyak 13 berkas. Capaian tersebut terdiri atas penyelesaian melalui mekanisme Penghapusan Secara Bersyarat Dengan Tanggung Jawab (PSBDT) sebanyak 7 berkas dan penyelesaian melalui pelunasan sebanyak 6 berkas. Dengan demikian, realisasi penyelesaian BKPN telah melampaui target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 11,6 sebagaimana ditetapkan dalam Addendum Target Triwulan IV.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	128.45
2024	94	-	100	-	-	101.57
2023	100	-	100	-	-	122.86
2022	100	-	100	-	-	122
2021	100	-	100	-	-	122.22

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, Iku persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara tidak terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi, antara lain:

- a. Melaksanakan penagihan dan penelitian lapangan kepada debitur yang dibuktikan dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai dasar tindak lanjut pengurusan piutang negara.
- b. Melakukan penggalan potensi piutang negara melalui koordinasi dengan satuan kerja dan pemerintah daerah guna mengidentifikasi serta menindaklanjuti potensi piutang negara yang dapat diselesaikan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara antara lain masih terdapat Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang belum optimal tingkat pengurusannya. Selain itu, adanya penetapan addendum target kinerja turut menjadi tantangan dalam pencapaian target penyelesaian BKPN.

Untuk mengatasi kendala tersebut, mitigasi risiko yang telah disusun dan dilaksanakan antara lain melakukan pengurusan piutang negara secara lebih optimal melalui penyampaian Surat Paksa serta pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Melakukan pemanggilan, penagihan langsung, serta penelitian lapangan kepada debitur;
- b. Melaksanakan penagihan melalui surat serta pemanfaatan saluran komunikasi telepon dan WhatsApp;
- c. Menyampaikan Surat Paksa sebagai bagian dari langkah penegakan pengurusan piutang negara; dan
- d. Melakukan penyitaan serta lelang barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

KPKNL Singaraja	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max /
Realisasi	109.5	106.07	107.22	102.36	105.97	105.61	105.61	AVG
Capaian	156.43	151.53	153.17	146.23	151.39	150.87	150.87	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	-	70	-	-	105.61
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, Iku Tingkat kualitas layanan penilaian tidak terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi, antara lain:

- a. Melaksanakan proses penilaian secara konsisten dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku guna memastikan kualitas layanan dan kesesuaian proses dengan ketentuan.
- b. Mengimbuu satuan kerja (satker) yang telah mengajukan permohonan penilaian untuk melakukan penginputan data permohonan secara tepat dan lengkap melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) sebagai bagian dari pengendalian proses layanan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara antara lain

- a. Pengukuran indeks penilaian dihitung secara menyeluruh mulai dari permohonan diterima sampai dengan laporan di sampaikan. Tidak ada penghentian norma waktu pengukuran di tengah-tengah proses, hal ini menjadi masalah Ketika jadwal pelaksanaan penilaian yang padat, sehingga saat berkas lengkap tidak bisa langsung dilaksanakan survey lapangan, hal ini tentu akan menambah norma waktu yang menjadi dasar perhitungan sehingga nilai indeks penyelesaian layanan akan lebih kecil.

- b. Proses Input permohonan pada aplikasi SIP belum sepenuhnya dilaksanakan secara paralel oleh satuan kerja pemohon, sehingga ada kemungkinan terjadi input permohonan yang tidak bersamaan antara nadine dan SIP.
- c. Impementasi awal aplikasi SIP untuk sebagian besar probis penilaian. Pada masa transisi aplikasi SIP masih diperlukan proses penyesuaian yang berpotensi memperlambat pemberian layanan.
- d. Pemahaman satker untuk penggunaan aplikasi SIP belum menyeluruh.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Pemantauan melalui dashboard penilaian untuk meminimalkan risiko keterlambatan penyelesaian layanan penilaian, dilakukan pemantauan secara berkala melalui dashboard penilaian guna memastikan setiap tahapan proses berjalan sesuai norma waktu yang ditetapkan serta mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini.
- b. Pelaksanaan peer review konsep laporan penilaian sebagai upaya menjaga kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian laporan penilaian, dilakukan peer review terhadap konsep laporan penilaian. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko perbaikan berulang serta memastikan kesesuaian substansi laporan sebelum ditetapkan sebagai laporan final.
- c. Koordinasi dengan satuan kerja (satker) dalam rangka mengurangi risiko keterlambatan akibat kendala administrasi dan pemahaman proses, dilakukan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja (satker), khususnya terkait kelengkapan berkas permohonan dan pemahaman penggunaan aplikasi SIP, sehingga proses penilaian dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah :
 - Menyelesaikan pelaksanaan penilaian dengan disiplin serta berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan guna menjaga kualitas layanan dan ketepatan waktu penyelesaian.
 - Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Seksi PKN agar berkas permohonan penilaian yang disampaikan telah lengkap sejak awal serta telah terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), sehingga proses penilaian dapat berjalan lebih efektif.
 - Melakukan uji coba penginputan SIP secara mandiri serta melaksanakan kegiatan sharing knowledge antar penilai terkait penggunaan aplikasi SIP guna meningkatkan pemahaman dan meminimalkan kendala teknis dalam proses penilaian.

4) Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian.

Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

KPKNL Singaraja	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	30	40	40	70	70	80	80	Max /
Realisasi	58.07	66.85	66.85	90.32	90.32	115.14	115.14	TLK
Capaian	193.56	167.13	167.13	129.03	129.03	143.93	143.93	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	-	-	143.93
2024	89	-	34	-	-	98.71
2023	80*	-	34	36	-	117.73*
2022	36	-	34	-	-	41.24
2021	35	-	34	-	-	54.46

*Terdapat perubahan manual IKU

Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Memprioritaskan penetapan jadwal lelang ulang terhadap objek lelang yang memiliki potensi laku guna meningkatkan tingkat keberhasilan lelang.
- b. Melakukan penggalian potensi lelang melalui koordinasi dengan satuan kerja dan stakeholder guna menambah jumlah objek lelang yang siap ditayangkan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
- d. Melaksanakan rangkaian kegiatan lelang, antara lain lelang non-eksekusi sukarela (UMKM) dan lelang eksekusi Hak Tanggungan, termasuk dalam rangka peringatan Hari Lelang.
- e. Melaksanakan sosialisasi lelang kepada stakeholder untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pelaksanaan lelang.

Pada dasarnya, tidak terdapat kendala atau permasalahan yang signifikan dalam pencapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang karena capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, pada aspek operasional masih terdapat beberapa kendala teknis terkait penggunaan aplikasi lelang versi 2 yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi lelang versi 2 kepada pengguna layanan lelang guna meningkatkan pemahaman dan kelancaran operasional;
- b. Melakukan monitoring atas pelaksanaan pelayanan lelang sebagai bagian dari upaya continuous improvement.

Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah

- a. Melakukan penggalian potensi lelang melalui penguatan peran dan partisipasi stakeholder;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan lelang; dan
- c. Melaksanakan sosialisasi lelang melalui berbagai kanal komunikasi.

6. SASARAN STRATEGIS : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG AKUNTABEL SERTA SDM YANG ADAPTIF

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Selain itu, dibutuhkan dukungan dari Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang baik dan adaptif. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti tidak hanya pelatihan namun juga bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, benchmark, e-learning, mentoring, hingga secondment dan job-shadowing serta bentuk peningkatan kompetensi pegawai lainnya sesuai perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%	120%
2	Indeks tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%	120%	120%
3	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96.27%	120.34%

Uraian mengenai ketiga Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Indikator Indeks Kualitas Kinerja Anggaran digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja organisasi. Pengelolaan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan, serta menerapkan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah, dengan tetap memastikan terpenuhinya output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dilakukan untuk menilai kepatuhan, efektivitas, serta keterkaitan antara anggaran dan kinerja. Ruang lingkup perhitungan indikator ini mengacu pada ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 Pasal 249 ayat (7), yang menyatakan bahwa nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Dalam implementasinya, nilai kinerja anggaran tersebut direfleksikan melalui Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III serta Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA). NKA merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas 50% Realisasi IKPA dan 50% hasil evaluasi kinerja anggaran melalui aplikasi SMART. Kombinasi kedua komponen tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta keterkaitan antara anggaran dan kinerja unit kerja.

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	TLK
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	120
2024	100	100	100	100	-	120
2023	100	95	95	95	-	111.84
2022	95.5	95	95	95	-	92.42
2021	95.5	95	95	95	-	95.70

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Capaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Kinerja indikator didukung oleh pelaksanaan pengendalian anggaran secara berkala, peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Peningkatan capaian kinerja tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta keterkaitan antara realisasi anggaran dan pencapaian output.

Selain itu, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung secara langsung pencapaian target kinerja, sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi.

Target Indeks Kinerja Anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
- b) Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang teknis untuk penyusunan RPD
- c) Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang teknis untuk pengisian Capaian Output dengan tepat waktu;

- d) Melakukan monitoring atas realisasi penyerapan anggaran sebelum akhir triwulan.
- e) Menyediakan worksheet yang bisa diakses oleh seluruh bidang teknis yang dapat digunakan sebagai monitoring anggaran

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang signifikan pada awal tahun anggaran oleh Presiden RI. Kebijakan tersebut berupa pembatasan belanja operasional pendukung kinerja pada pos-pos Perjalanan dinas, Rapat/seminar, ATK dan efisiensi pada Belanja Pemeliharaan dan belanja Modal.
- b) Adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran, yaitu berupa penambahan anggaran di pertengahan tahun yang menyebabkan saat pembukaan blokir pada triwulan III, unit teknis mengalami kesulitan dalam penyerapan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran atau melakukan revisi RPD;
- b) Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi;
- c) Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode;
- d) Melaksanakan GUP sesuai dengan ketentuan agar tidak meleset dari RPD setiap bulannya;
- e) Memperhatikan data kontrak yang akan disampaikan ke KPPN;
- f) Mengisi capaian output setiap awal bulan sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan oleh setiap seksi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun dengan memperhatikan efisiensi;
- b) Membuat perencanaan yang lebih matang antara subbagian umum, PBJ dengan PPK agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal;
- c) Membuat daftar prioritas yang akan dilakukan penyerapan anggaran.
- d) Kebijakan percepatan penyerapan dilakukan di awal hingga pertengahan tahun.

2) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada unit kerja, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan tingkat pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas beberapa komponen, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan bobot 60 persen, E-Tendering sebesar 10 persen, E-Purchasing melalui Katalog Elektronik sebesar 10 persen, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing sebesar 10 persen, serta E-Kontrak sebesar 10

persen. Penilaian pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III dilakukan melalui mekanisme self assessment, sedangkan penilaian Triwulan IV dilakukan oleh Inspektorat Teknis Kepatuhan Pengadaan (ITKP) berdasarkan hasil evaluasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Kinerja indikator didukung oleh peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam aplikasi SIRUP, serta meningkatnya pemanfaatan E-Tendering dan E-Purchasing dalam proses pengadaan.

Pemanfaatan E-Kontrak telah mendukung peningkatan akuntabilitas dan kemudahan monitoring pelaksanaan kontrak. Sementara itu, pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme Non E-Tendering dan Non E-Purchasing tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah dikendalikan untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator antara lain penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan kegiatan dan keterbatasan waktu pelaksanaan, yang telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penyesuaian pelaksanaan pengadaan.

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-CP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	TLK
Capaian	100	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	100
2024	-	-	-	-	-	-
2023	100	-	-	-	-	100
2022	100	-	-	-	-	100
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan

Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) segera setelah blokir anggaran dibuka, sehingga kegiatan dapat langsung dieksekusi tanpa menunda waktu pelaksanaan.
- b) Monitoring intensif proses Percepatan pelaksanaan pengadaan pengadaan melalui e-katalog, untuk memastikan tahapan pengadaan tidak terlewat batas waktu, sehingga tidak perlu mengulang proses dari awal.
- c) Koordinasi lebih awal terkait rencana belanja modal, sehingga pada saat blokir dibuka, seluruh persiapan teknis dan administratif telah siap untuk segera direalisasikan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah pembukaan blokir anggaran yang baru dilakukan pada Triwulan III, sehingga menyulitkan percepatan proses pengadaan. Selain itu, pada belanja modal kendaraan, keterbatasan pagu anggaran dibandingkan dengan harga kendaraan di wilayah Bali yang relatif lebih tinggi mengharuskan KPKNL Singaraja melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk pelaksanaan pembelian di lokasi lain agar tetap sesuai dengan pagu yang tersedia

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Peningkatan pengawasan internal untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

- b) Penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.
- c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan melalui pembinaan dan pendampingan.
- d) Penerapan kebijakan tidak menggunakan vendor yang sama secara berulang guna mencegah potensi konflik kepentingan.
- e) Optimalisasi pemanfaatan e-Katalog dan Digipay sebagai sarana transaksi untuk meminimalkan risiko mark-up serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) Peningkatan kepatuhan terhadap pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, dengan target minimal 80% transaksi dilakukan secara non tunai melalui e-Katalog, Digipay, dan Kartu Kredit Pemerintah.
- b) Perbaikan kualitas data dan kelengkapan dokumen pengadaan guna mendukung akurasi penilaian kinerja.
- c) Penguatan koordinasi lintas unit kerja untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil penilaian.

3) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Pengukuran indikator ini mencakup aspek penguatan budaya organisasi dan pembinaan mental, serta pemenuhan jam pelatihan dan pemanggilan pelatihan pegawai.

Pengukuran indikator terdiri atas dua komponen. Komponen A, yaitu Penguatan Budaya dan Pembinaan Mental Pejabat Administrator, yang meliputi tingkat kualitas pelaksanaan program/kegiatan pembinaan mental (Unsur A) dan tingkat sinergi antar generasi (Unsur B). Unsur A diukur berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan dan hasil umpan balik peserta, sedangkan Unsur B diukur berdasarkan nilai kegiatan yang mencerminkan tingkat sinergi antar generasi. Komponen B, yaitu Pemenuhan Jam Pelatihan dan Pemanggilan Pelatihan, terdiri atas Komponen I yang mengukur pemenuhan minimal 25 Jam Pelatihan pegawai berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang memenuhi jam pelatihan dengan jumlah pegawai aktif, serta Komponen II yang mengukur pemenuhan pemanggilan pelatihan berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan dengan jumlah pegawai yang terpanggil.

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max /
Realisasi	25.21	57.30	57.30	80.73	80.73	96.27	96.27	TLK
Capaian	126.07	143.24	143.24	134.55	134.55	120.34	120.34	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	120.34
2024	90	-	-	-	-	114
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	116.47

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai menunjukkan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan penguatan budaya organisasi telah dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan karakteristik peserta. Hasil evaluasi kegiatan melalui umpan balik peserta menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan pemahaman dan sikap kerja pegawai.

Pemenuhan jam pelatihan dan pemanggilan pelatihan pegawai telah dipantau secara berkala. Peningkatan capaian indikator didukung oleh koordinasi dengan unit terkait,.

Target Persentase pengembangan kompetensi pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Mengusulkan pegawai yang belum memiliki kompetensi di Seksi/Subbag maupun kelompok Jabatan Fungsional untuk dipanggil Diklat;
- b) Mengingatkan dan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai agar mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi klc2.kemenkeu.go.id dan aplikasi diklat.
- c) Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala;
- d) Penyusunan rencana melalui Individual Development Plan (IDP);
- e) Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory;
- f) Mengkomunikasikan secara aktif pemanggilan diklat kepada pegawai;
- g) Membuat daftar *tracking* pegawai yang telah mencapai target JP maupun yang telah melampaui target agar capaian dapat selalu ter update.
- h) Monitoring triwulanan capaian pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

- a) Pegawai mengajukan pengunduran diri dari pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat karena bersamaan dengan Pelaksanaan Dinas Luar Pegawai;
- b) Terdapat beberapa pegawai yang tidak mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat.
- c) Terdapat pegawai yang tidak memenuhi target Jam Pelatihan.
- d) Jenis diklat maupun e- learning yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai masih terbatas

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Pegawai yang berhalangan mengikuti pemanggilan diklat dihimbau mencari pengganti;
- b) Menghimbau seluruh pegawai untuk mengusulkan diklat pada aplikasi diklat.
- c) Menghimbau untuk menyelesaikan pemenuhan jamlat di awal tahun

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) para pegawai yang dalam data *tracking* belum memenuhi target JP.
- b) Membuat Nota Dinas terkait himbauan mengikuti e-Learning Open Access ataupun pengajuan diklat.
- c) Memonitoring pemenuhan jamlat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat;
- e) Memonitoring pemenuhan pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat.

7. SASARAN STRATEGIS : PENANGANAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif merupakan sasaran strategis yang mencerminkan kapasitas organisasi dalam menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, dan mengendalikan potensi kerugian organisasi melalui pengelolaan permasalahan hukum secara profesional, terukur, dan berkelanjutan, baik litigasi maupun non-litigasi, sejak tahap awal penanganan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, serta didukung oleh penyelenggaraan komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif melalui layanan informasi publik yang kredibel, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran strategis Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (IKU).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks penanganan permasalahan hukum	100.00%	116.27%	116.27%
2	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80.00%	142.50%	120.00%

Uraian mengenai Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum dalam rangka pengendalian kerugian organisasi diukur melalui dua komponen utama, yaitu Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan dengan bobot sebesar 80 persen dan target nilai 85, serta Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap dengan bobot sebesar 20 persen dan target nilai 90. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan digunakan untuk mengukur ketepatan dan kualitas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi DJKN sesuai

dengan tugas dan fungsinya, baik litigasi maupun non-litigasi. Pengukuran dilakukan sejak diterimanya Relas Gugatan atau Panggilan Sidang oleh DJKN dan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan hingga perkara dinyatakan selesai atau berkekuatan hukum tetap, dengan ruang lingkup meliputi perkara tahun berjalan yang belum memperoleh putusan, perkara baru yang diperhitungkan sampai dengan November 2025, serta seluruh penanganan perkara yang dilakukan oleh Kanwil maupun KPKNL di wilayah kerjanya.

Komponen Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap digunakan untuk mengukur hasil akhir penanganan perkara yang telah memperoleh putusan *inkracht van gewijsde*, baik perkara perdata, tata usaha negara, maupun uji materiil dan uji formil pada pengadilan yang berwenang, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putusan berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang tidak lagi terbuka upaya hukum dan tidak dapat diubah oleh hakim atau pengadilan lain, dengan klasifikasi putusan didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan oleh Majelis Hakim. Ruang lingkup pengukuran meliputi perkara tahun berjalan yang telah memperoleh putusan serta seluruh penanganan perkara di lingkup Kanwil yang dilakukan baik secara langsung oleh Kanwil maupun oleh KPKNL dalam wilayah kerjanya.

Selama Selama tahun 2025, KPKNL Singaraja menangani 38 perkara, dengan 15 perkara masih dalam proses penanganan dan 23 perkara telah diselesaikan. Seluruh perkara yang telah selesai tersebut memperoleh putusan yang memenangkan KPKNL Singaraja, yang mencerminkan efektivitas strategi penanganan perkara, ketepatan penyusunan argumentasi hukum, serta optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam mengendalikan potensi kerugian organisasi. termasuk pada upaya hukum lanjutan. Pada tahun 2025, KPKNL Singaraja mencatat 9 perkara pada tingkat banding, dengan 6 perkara telah memperoleh putusan dan seluruhnya dimenangkan, serta 8 perkara pada tingkat kasasi, dengan 5 perkara telah memperoleh putusan dan dimenangkan, sementara perkara lainnya masih dalam proses penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi kualitas pembelaan hukum dan pengelolaan perkara yang profesional di KPKNL Singaraja.

KPKNL Singaraja	Komunikasi Publik yang Efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	112.51	112.96	112.96	116.29	116.29	116.27	116.27	TLK
Capaian	112.51	112.96	112.96	116.29	116.29	116.27	116.27	
Nilai Kinerja	112.51	112.96	112.96	116.29	116.29	116.27	116.27	

Capaian kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada KPKNL Singaraja menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun berjalan, target kinerja pada setiap periode pengukuran ditetapkan sebesar 100, dan realisasi kinerja tercatat konsisten berada di atas target. Pada Triwulan I, realisasi mencapai 112,51, meningkat pada Semester I menjadi 112,96, dan terus mengalami penguatan hingga Triwulan III dengan capaian sebesar 116,29. Pada akhir tahun, realisasi kinerja tercatat sebesar 116,27, yang sekaligus menjadi capaian tahunan dan menunjukkan stabilitas kinerja pada level yang optimal.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas KPKNL Singaraja dalam menangani permasalahan hukum secara tepat waktu, terukur, dan profesional, baik pada tahap penanganan perkara di pengadilan maupun dalam pengelolaan perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Konsistensi capaian di atas target ini didukung oleh kualitas koordinasi internal, ketepatan strategi penanganan perkara litigasi dan non-litigasi, serta kemampuan menjaga hasil putusan yang menguntungkan negara. Dengan capaian kinerja tersebut, KPKNL Singaraja dinilai berhasil mendukung sasaran strategis pengendalian potensi kerugian organisasi serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja penanganan hukum yang akuntabel.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	116,27
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, penetapan target kinerja tahun 2025 telah melalui proses alignment dengan Perjanjian Kinerja, serta diselaraskan dengan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2021–2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan pada tahun berjalan. Proses penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan pada setiap level perencanaan.

Adapun terkait Standar Nasional, hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang secara spesifik mengatur atau dapat dijadikan pembanding terhadap indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum, sehingga capaian kinerja dievaluasi berdasarkan target internal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan strategis terkait.

Target IKU Indeks penanganan permasalahan hukum berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Penerapan manajemen penanganan perkara yang terstruktur, mulai dari penerimaan relaas gugatan atau panggilan sidang, pemetaan risiko hukum, hingga penentuan strategi penanganan perkara litigasi dan non-litigasi secara tepat dan terukur.
- b) Penguatan koordinasi internal dan eksternal, baik antara KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN maupun dengan unit teknis terkait, guna memastikan ketersediaan data, kelengkapan dokumen, serta keselarasan argumentasi hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara.
- c) Optimalisasi kualitas penyusunan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, serta penyampaian alat bukti secara lengkap dan tepat waktu, sehingga mendukung keberhasilan pembelaan kepentingan negara di persidangan.
- d) Pemantauan dan pengendalian perkara secara berkala, termasuk evaluasi atas perkara yang masih berjalan dan penanganan upaya hukum lanjutan, guna memastikan seluruh tahapan proses peradilan dilaksanakan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang berlaku.
- e) Peningkatan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia, melalui pembagian peran yang jelas, pendampingan hukum yang memadai, serta pemanfaatan pengalaman penanganan perkara sebelumnya sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan.
- f) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (SIBANKUM) sebagai sarana pencatatan, pemantauan, dan pengendalian penanganan perkara secara terintegrasi, sehingga perkembangan setiap perkara dapat dimonitor secara real time dan terdokumentasi dengan baik.
- g) Pemanfaatan layanan e-Court Mahkamah Agung dalam proses pendaftaran perkara, pengajuan dokumen persidangan, dan pemantauan jadwal persidangan, yang mendukung percepatan proses administrasi perkara serta meningkatkan kepatuhan terhadap batas waktu persidangan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks penanganan permasalahan hukum antara lain :

- a) Lokasi Pengadilan Negeri yang relatif jauh dari wilayah kerja KPKNL Singaraja menyebabkan perlunya pengaturan waktu dan koordinasi yang lebih matang dalam menghadiri persidangan maupun kegiatan terkait proses peradilan.
- b) Jadwal dan tahapan persidangan sepenuhnya ditetapkan oleh pengadilan, sehingga perubahan jadwal dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi mempengaruhi target waktu penyelesaian perkara.
- c) Waktu persidangan yang terbatas sering kali menyebabkan agenda perkara tidak dapat diselesaikan dalam satu kali sidang, sehingga memerlukan penjadwalan lanjutan dan memperpanjang durasi penanganan perkara.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain :

- a) Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIBANKUM sebagai sarana pencatatan, pemantauan, dan pelaporan penanganan perkara, serta pemanfaatan e-Court Mahkamah Agung untuk mendukung administrasi dan proses persidangan secara elektronik.
- b) Menyusun perencanaan penanganan perkara secara lebih sistematis sejak awal, termasukantisipasi perubahan jadwal persidangan dan kesiapan dokumen hukum.
- c) Melakukan koordinasi secara intensif dengan unit teknis dan pihak terkait guna memastikan kelengkapan serta ketepatan waktu penyediaan dokumen pendukung perkara.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a) Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pembelajaran berkelanjutan, diskusi kasus (case sharing), dan pendalaman regulasi terbaru yang relevan dengan penanganan perkara.
- b) Melakukan pemetaan potensi perkara berdasarkan jenis, tingkat risiko, dan implikasi hukum untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan terukur.
- c) Menyusun dan menyempurnakan standar operasional internal berupa template dokumen, kronologi perkara, dan ringkasan hukum guna meningkatkan konsistensi dan kualitas penanganan perkara.

2) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Selama tahun 2025, KPKNL Singaraja menerima 1 (satu) permohonan Layanan Informasi Publik terkait informasi Lelang.

KPKNL Singaraja	Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	115	115	115	115.33	115.33	114.00	114,00	TLK
Capaian	143.75	143.75	143.75	144.17	144.17	142.50	142.50	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:

- a) Penetapan Keputusan Kepala KPKNL Singaraja tentang Tim PPID dan Laporan PPID;
- b) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DJKN, yaitu informasi yang wajib diumumkan atau diubah, meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara spontan, pada saat itu juga mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi tersebut. Informasi ini diumumkan melalui website DJKN;
- d) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID DJKN.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	114,00
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Membuat pelaporan PPID sekaligus menetapkan Keputusan Kepala KPKNL Singaraja sebelum tenggat waktu yaitu di akhir tahun 2025;
- b) Selalu melakukan update di website DJKN atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;

- c) Memproses permohonan PPID dengan cepat dan sesuai prosedur, jika permohonan tidak lengkap maka dimintakan kelengkapannya, jika permohonan lengkap maka akan langsung ditindaklanjuti.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

- a) Tidak fleksible saat ingin melakukan update website, karena perangkat laptop/komputer harus terhubung dengan LAN Kemenkeu;
- b) Perhitungan laporan PPID menggunakan dateline yang ada di awal tahun sebelum ditentukannya perhitungan IKU tersebut, sehingga pelaporan sudah dilakukan saat perhitungan IKU baru ditentukan;
- c) Perubahan komponen perhitungan, dimana disesuaikan dengan kondisi saat triwulan berakhir.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Melakukan update informasi pada website sebelum tenggat waktu;
- b) Menyusun dan menyampaikan laporan PPID sebelum tenggat waktu;
- c) Memonitoring komponen informasi publik yang wajib di update di setiap triwulannya.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) Koordinasi dengan PIC pada Direktorat HUUH
- b) Monitoring permintaan informasi public

8. SASARAN STRATEGIS : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL, SERTA MANAJEMEN RISIKO YANG EFEKTIF

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal. Sasaran ini mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penerapan manajemen kinerja yang terstruktur dan terukur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, serta penguatan manajemen risiko sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 guna mengantisipasi ketidakpastian dan meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Pencapaian sasaran strategis ini juga selaras dengan upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, penataan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, organisasi diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

serta manajemen risiko yang terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kinerja, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan tercapainya tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80%	97.72%	122.15%
2	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	109.71%	109.71%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

KPKNL Singaraja	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	100	95.69	95.69	99,05	99.05	97.72	97.72	TLK
Capaian	125	119.61	119.61	123.81	123.81	122.15	122.15	
Nilai Kinerja	120	119.61	119.61	120	120	120	120	

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko terbagi atas 3 (tiga) komponen penilaian yaitu:

- a) Pengelolaan Kinerja Organisasi
- b) Reviu atas pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.
- c) Manajemen Risiko
- d) Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.
- e) Pengelolaan Kinerja Pegawai
- f) Reviu atas pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97.72
2024	85	-	-	-	-	97.59
2023	80	-	-	-	-	96.51
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b) Melakukan asistensi atas permasalahan kinerja pada KPKNL Singaraja;
- c) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu setiap bulan;
- d) Melaksanakan Rapat Refinement Indikator Kinerja Utama;
- e) Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

- a) Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kinerja;
- b) Untuk kinerja aplikasi yang dipakai yaitu aplikasi modul kinerja pada satu Kemenkeu untuk meng-input SKP dan IKI serta HKT dan modul kinerja pada Satu Kemenkeu untuk meng-input Perjanjian Kinerja (PK) Pimpinan Unit dan juga untuk penilaian perilaku. Penggunaan aplikasi baru menimbulkan kebingungan di beberapa pegawai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Pengelolaan kinerja organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja. Sedangkan pengelolaan kinerja pegawai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP;
- b) Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan;
- c) Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kinerja dan risiko.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP dan melakukan review;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen kinerja dan risiko;
- c) Melakukan sosialisasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai KPKNL Singaraja;
- d) Melakukan asistensi kepada pegawai terkait kinerja.

2) Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- a) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00
- b) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- c) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

KPKNL Singaraja	Komunikasi Publik yang Efektif							
	8b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	100	100	100	100	109.71	109.71	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	109.71	109.71	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	109.71	109.71	

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- a) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- b) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- c) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	109.71
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	75	-	-	-	-	88.40
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Keterlibatan seluruh pegawai KPKNL Singaraja baik pegawai ASN maupun non-ASN (PPNPN) dalam mewujudkan Pembangunan ZI-WBK/WBBM di KPKNL Singaraja.
- b) Persyaratan Pembangunan ZI-WBK/WBBM yang lengkap dan dapat dipenuhi tepat waktu.
- c) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK/WBBM secara bulanan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

- a) Batas waktu unggah di aplikasi DIA sangat sempit sehingga terkadang dilakukan secara terburu-buru;
- b) SK mutasi pejabat dan pelaksana yang seringkali keluar di tengah tahun dan menyebabkan pergantian anggota tim ZI/WBK-WBBM;
- c) Dokumen persyaratan yang belum terkumpul dalam satu tempat.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait keberlanjutan ZI WBK/WBBM;
- b) Melakukan koordinasi dengan UKI Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta UKI Pusat;
- c) Membuat Inovasi 1Singaraja untuk memudahkan pengumpulan dokumen.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a) Melanjutkan Inovasi yang sudah dibuat untuk digunakan dengan lebih optimal;
- b) Menyiapkan dokumen terkait Surat Keputusan yang dibutuhkan dalam pembangunan ZI-WBBM dan menetapkannya di bulan Januari;
- c) Mengumpulkan dokumen persyaratan di awal waktu sehingga tidak tergesa-gesa dan terdapat cukup waktu untuk mengevaluasi ulang dokumen dan memastikan dokumen persyaratan lengkap;
- d) Menyusun Surat Keputusan Pimpinan Unit terkait Inovasi dan penyusunan proposal inovasi.

B. REALISASI ANGGARAN 2025

Pengelolaan anggaran merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam suatu instansi pemerintah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan Realisasi Anggaran ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dalam periode tertentu.

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Singaraja Tahun Anggaran 2025 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp1.957.027.909,- atau 86.02% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.275.121.000,-. Realisasi per jenis belanja KPKNL Singaraja Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Barang	1.789.292.000	1.508.327.208	84.30%
Belanja Modal	485.829.000	448.700.701	92.36%
TOTAL	2.275.121.000	1.957.027.909	86.02%

Data pagu dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir belum sepenuhnya mencerminkan kondisi anggaran yang tersedia secara efektif, karena masih terdapat pagu anggaran yang diblokir. Blokir anggaran tersebut mempengaruhi perhitungan realisasi anggaran secara keseluruhan. Adapun pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Singaraja memiliki pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp266.009.000 dari total pagu yang ditetapkan.

selain itu, guna memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tren realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singaraja, berikut disajikan realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singaraja selama periode 2021 sampai dengan 2025 yaitu:

Tabel 3. 2 Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Periode 2021 s.d. 2025

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2025	-	-	1.789.292.000	1.508.327.208	485.829.000	448.700.701	97,07%
2024	-	-	1.469.569.000	1.418.113.167	384.440.000	381.540.000	97,07%
2023	-	-	1.271.848.000	1.156.135.428	36.534.000	36.174.500	91,13%
2022	-	-	1.108.837.000	1.107.123.609	-	-	99,85%
2021	-	-	985.773.000	981.130.062	-	-	99,53%

Tabel 3. 3 Rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA KPKNL Singaraja per kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.

Kode	Uraian	BELANJA		Referensi
		Pagu	Realisasi	
01	PELAYANAN UMUM	2.275.121.000,00	1.957.027.909,00	
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.275.121.000,00	1.957.027.909,00	
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	338.960.000,00	252.573.724,00	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	34.440.000,00	0,00	
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	34.440.000,00	0,00	
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	22.973.000,00	0,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8.244.000,00	0,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3.223.000,00	0,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
4798	Pengelolaan Aset	304.520.000,00	252.573.724,00	

Kode	Uraian	BELANJA		Referensi
		Pagu	Realisasi	
AAH	Peraturan lainnya	160.783.000,00	142.205.270,00	
001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	108.663.000,00	93.730.000,00	00
002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	52.120.000,00	48.475.270,00	00
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	14.720.000,00	13.480.000,00	
002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	14.720.000,00	13.480.000,00	00
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	21.600.000,00	20.840.000,00	
001	Risalah Lelang	21.600.000,00	20.840.000,00	00
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	63.544.000,00	38.368.197,00	
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.408.000,00	5.626.000,00	00
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	21.280.000,00	20.409.779,00	00
007	Penggalian Potensi Lelang	35.856.000,00	12.332.418,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
FAK	Pengelolaan Aset BUN	19.993.000,00	18.835.441,00	
001	Aset BUN yang Dikelola	19.993.000,00	18.835.441,00	00
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23.880.000,00	18.844.816,00	
201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	23.880.000,00	18.844.816,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
WA	Program Dukungan Manajemen	1.936.161.000,00	1.704.454.185,00	
4700	Legislasi dan Litigasi	26.790.000,00	26.269.396,00	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.790.000,00	26.269.396,00	
969	Layanan Bantuan Hukum	26.790.000,00	26.269.396,00	00
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.876.959.000,00	1.665.173.335,00	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.391.130.000,00	1.216.472.634,00	
002	Kerumahtanggaan	153.835.000,00	121.422.779,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran

Kode	Uraian	BELANJA		Referensi
		Pagu	Realisasi	
994	Layanan Perkantoran	1.237.295.000,00	1.095.049.855,00	00
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	485.829.000,00	448.700.701,00	
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	67.070.000,00	32.600.700,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
003	Kendaraan Bermotor	418.759.000,00	416.100.001,00	00
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	19.092.000,00	6.458.597,00	
BMB	Komunikasi Publik	19.092.000,00	6.458.597,00	
002	Kehumasan	19.092.000,00	6.458.597,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	13.320.000,00	6.552.857,00	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13.320.000,00	6.552.857,00	
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	13.320.000,00	6.552.857,00	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran

C. KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, pada Tahun 2025 KPKNL Singaraja juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi, antara lain melalui kegiatan edukasi dan komunikasi (edukom) Lelang dan Piutang Negara, pelaksanaan inovasi KPKNL Singaraja Mendengar, pelaksanaan kegiatan Tali Kasih kepada para pensiunan DJKN, serta berbagai kegiatan sosialisasi, penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, dan memberikan pelayanan publik yang semakin optimal.

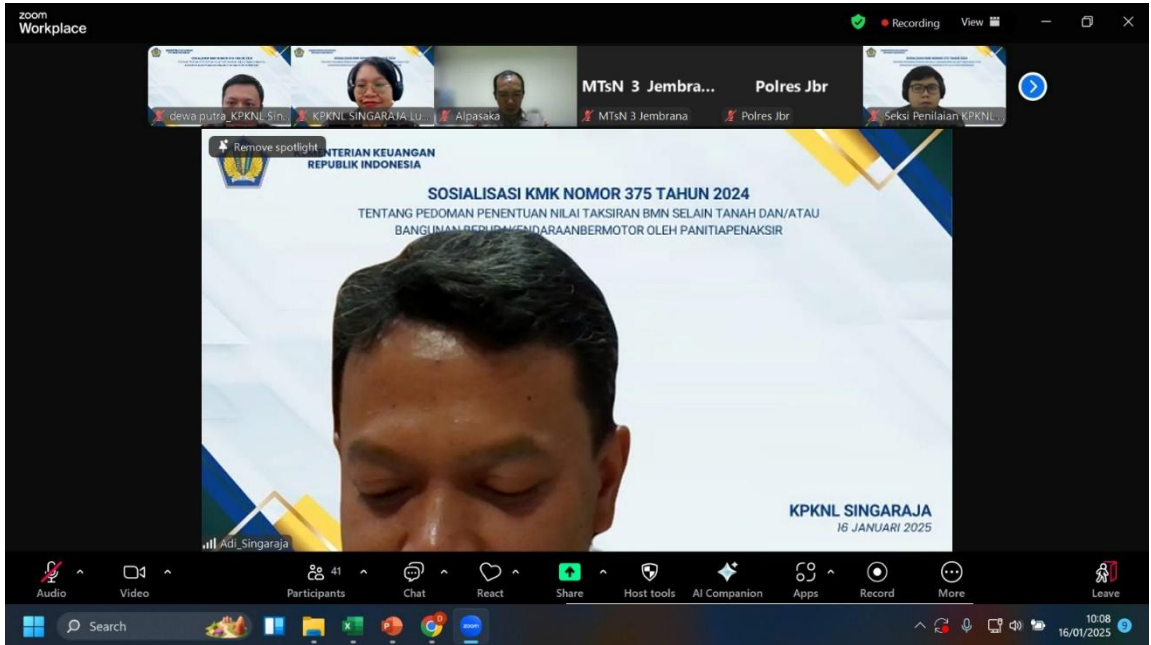


Foto 1 **Sosialisasi KMK 375 Tahun 2024 16 Januari 2025**



Foto 2 **Bintal Rohani 19 Maret 2025**



Foto 3 Pembinaan Piutang Negara 29 April 2025

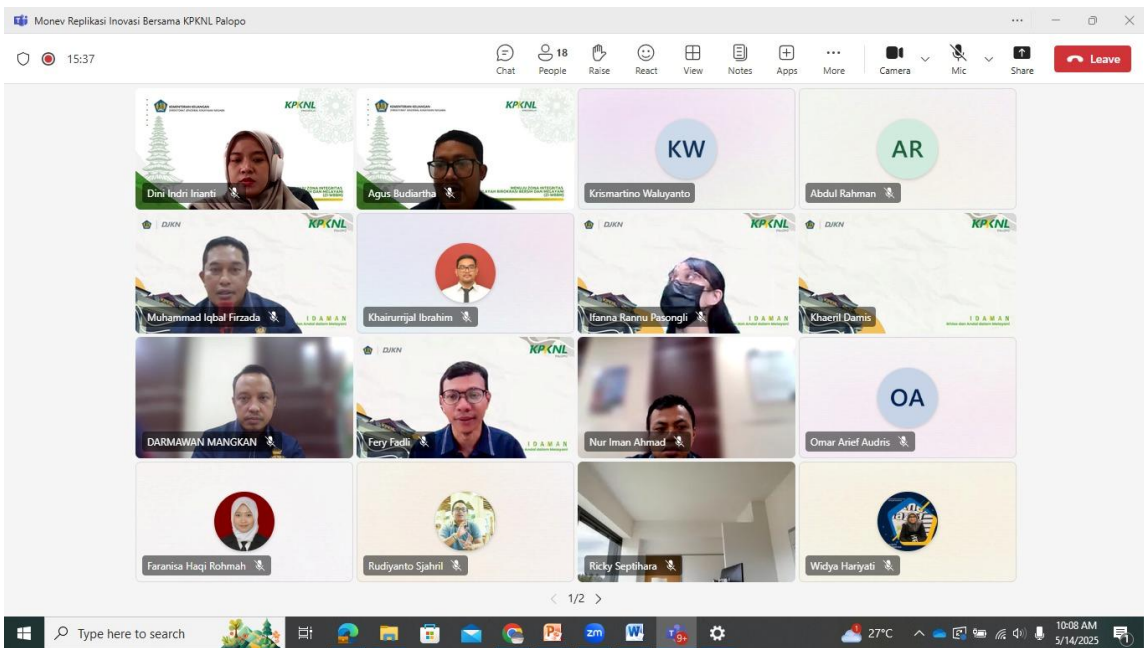


Foto 4 Replikasi Inovasi Bersama KPKNL Palopo 14 Mei 2025



Foto 5 One Day Service Pengurusan Piutang Negara 21 Mei 2025



Foto 6 Edukom Lelang 16 Juni 2025



Foto 7 Integrity Fun Walk 20 Juni 2025



Foto 8 family Day 4 Juli 2025



Foto 9 Edukom Piutang Negara 14 Agustus 2025



Foto 10 Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 15 Agustus 2025



Foto 11 Penilaian WBBM Oleh Tim Penilai Nasional 9 September 2025



Foto 12 Forum Konsultasi Publik 16 September 2025



Foto 13 Tali Kasih DJKN 27 November 2025



Foto 13 Pendampingan Penelitian Lapangan Kepada KPKNL Tangerang I 16 Desember 2025

D. PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025, KPKNL Singaraja berhasil meraih penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai. Penghargaan ini mencerminkan komitmen KPKNL Singaraja dalam memberikan pelayanan yang optimal, menjalankan tata kelola yang baik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Adapun penghargaan yang diterima selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penghargaan Atas Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Berdasarkan Frekuensi Pelaporan Gratifikasi Dan Nilai Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2025, KPKNL Singaraja telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan berhasil mencapai atau bahkan melampaui target dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, serta pemberian pelayanan yang optimal kepada para stakeholder.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPKNL Singaraja mampu mengatasinya melalui langkah-langkah strategis, seperti pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan keuangan yang efisien, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan proses pengadaan, serta penguatan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait.

Ke depan, KPKNL Singaraja berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi secara berkala, mengatasi hambatan yang mungkin timbul, dan mengoptimalkan setiap aspek pelayanan serta pengelolaan kekayaan negara. Dengan demikian, diharapkan KPKNL Singaraja dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, KPKNL Singaraja telah membuktikan kinerja yang optimal pada tahun 2025 dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan kekayaan negara serta memberikan layanan yang berkualitas.



Lampiran





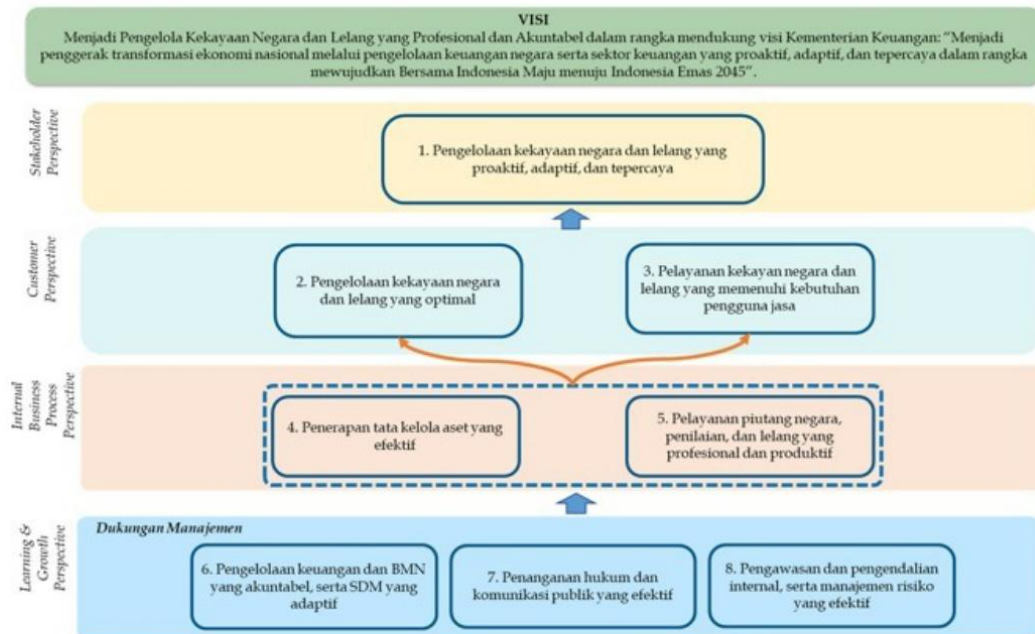
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.14/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp131 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp160 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp346,838,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp34,440,000
2. Pengelolaan Aset	Rp312,398,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp1,778,166,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp26,790,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,718,964,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp19,092,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp13,320,000

BULELENG, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Singaraja



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Purwoko



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp131 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp160 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

BULELENG, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Singaraja



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Purwoko



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

BULELENG, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Purwoko

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adi Purwoko	NAMA	Sudarsono	
NIP	19791106 200212 1 001	NIP	19691214 199603 1 002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,1 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp131 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp160 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



BULELENG, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono
19691214 199603 1 002



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko
19791106 200212 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,1 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp131 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp160 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



BULELENG, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono
19691214 199603 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko
19791106 200212 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL SINGARAJA
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-	-							111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	134,03%	14,00%	42,42%	134,03	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-							113,91	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	103,33%	19,00%	36,54%	103,33	103,33	37,76	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	134,05%	19,00%	36,54%	134,05	120,00	43,85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	122,69%	14,00%	26,92%	122,69	120,00	32,31	116,96
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-							120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	94,92	14,00%	50,00%	123,27	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	94,05	14,00%	50,00%	127,09	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-							111,12	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	102,24%	14,00%	50,00%	102,24	102,24	51,12	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-							120,00	115,56
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	128,45%	14,00%	33,33%	128,45	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	105,61%	14,00%	33,33%	150,87	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	115,14%	14,00%	33,33%	143,93	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-							120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	96,27%	14,00%	33,33%	120,34	120,00	40,00	
7	Panangan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-							118,13	117,66
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	116,27	14,00%	50,00%	116,27	116,27	58,13	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	114,00	14,00%	50,00%	142,50	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-							114,86	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	96,73	14,00%	50,00%	120,91	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	109,71	14,00%	50,00%	109,71	109,71	54,86	
NKO											115,16

Mengetahui

Kepala



Adi Nugroho
NIP. 197911012002121001

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,

Agus Budiarta
NIP. 19850522 200901 1 005

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2025

SS	IKU	Uraian	Polarisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Sampai dengan			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya								
1a-CP	Indeks Integritas		MAX/TLK	Tahunan				
a	Indeks Integritas				100,00	100,00	100,00	105,32
REALISASI IKU					120,00	120,00	100,00	105,32
1b-CP	Persentase realisasi penemuan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Realisasi Raw Data:				1.710.773.190,00	5.537.188.294,00	8.070.509.375,00	10.829.119.092,00
	PNBP Aset				804.435.477,00	2.321.570.245,00	3.559.777.336,00	3.874.545.551,00
	PNBP Lelang				844.501.350,00	3.202.799.596,00	4.497.427.167,00	6.938.086.850,00
	PNBP PN				1.836.363,00	12.818.453,00	13.304.872,00	16.486.691,00
b	Target Raw Data:				1.079.400.000,00	2.332.400.000,00	4.297.700.000,00	8.079.859.000,00
	PNBP Aset				730.200.000,00	1.480.400.000,00	2.556.700.000,00	3.651.000.000,00
	PNBP Lelang				347.200.000,00	868.000.000,00	1.736.000.000,00	4.415.975.000,00
	PNBP PN				2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	12.884.000,00
REALISASI IKU					158,49%	237,40%	187,79%	134,03%
2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan				2,00	1,50	1,17	0,71
b	Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan				0,00	0,50	1,58	2,42
REALISASI IKU					88,67%	66,67%	90,59%	103,33%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Realisasi Raw Data:				24.884.886.637,00	82.093.280.219,00	121.148.774.369,00	176.611.020.119,00
	Pokok Lelang PL I				16.232.729.737,00	67.888.464.819,00	93.474.939.969,00	138.760.447.819,00
	Pokok Lelang Pegadaian				8.652.156.900,00	14.204.815.400,00	27.674.834.400,00	38.850.572.300,00
b	Target Raw Data sesuai periode (TLK)				13.100.000.000,00	32.760.000.000,00	66.600.000.000,00	131.000.000.000,00
REALISASI IKU					189,96%	250,67%	184,96%	134,05%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Realisasi Raw Data:				39.778.692,00	149.599.564,00	154.463.748,00	196.308.319,00
b	Target Raw Data sesuai periode (TLK):				40.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00
REALISASI IKU					99,45%	187,00%	128,72%	122,69%
3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan		MAX/AVG	Triwulanan				
	Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan KPKNL				93,06			
REALISASI IKU					93,06	95,03	94,89	94,92
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		MAX/AVG	Triwulanan				
a	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Petelang				80			
b	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara				100			
REALISASI IKU					90,00	92,22	93,15	94,05
4 Penerapan tata kelola aset yang efektif								
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipkan		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Realisasi				14,00	114,00	162,00	274,00
	K1				-	1,00	1,00	2,00
	K2				-	-	-	-
	K3				14,00	30,00	62,00	116,00
	K4				-	83,00	99,00	156,00
b	Target Raw Data (Tahunan)				268,00	268,00	268,00	268,00
REALISASI IKU					5,22%	42,54%	60,46%	102,24%

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2025

SS	IKU	Uraian	Polarisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Sampai dengan			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Komponen A (Max 120%)				120,00%	88,88%	55,95%	120,00%
	Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan				20,00	47,00	47,00	128,00
	Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan				15,00	53,00	84,00	106,00
b	Komponen B (Max 120%)				0,00%	120,00%	120,00%	120,00%
	Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti				0,00	20,00	20,00	20,00
	Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker				1,00	6,00	6,00	6,00
	REALISASI IKU				60,00%	104,34%	87,98%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Realisasi Raw Data (Realisasi x Bobot)				4,40	9,20	11,80	14,90
	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 (Bobot = 1,2)				0,00	4,00	6,00	6,00
	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 (Bobot = 1,1)				4,00	4,00	4,00	7,00
	(Bobot = 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
b	Target Raw Data sesuai periode (TLK)				2,00	4,00	6,00	11,80
	REALISASI IKU				220,00%	230,00%	193,33%	128,45%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)				105,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian				105,00			
b	Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP				6,00			
	Jumlah Pemohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN				6,00			
c	Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)				125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85				2,00			
	Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang				2,00			
	% Target 2025				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	REALISASI IKU				109,50%	107,22%	105,97%	105,61%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang		MAX/TLK	Triwulanan				
a	Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)				113,98%	100,78%	105,67%	106,67%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela (Max 120%)				#DIV/0!	44,44%	66,67%	66,67%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela				#DIV/0!	33,33%	50,00%	50,00%
	Jumlah realisasi lot lelang laku				0,00	1,00	2,00	2,00
	Jumlah lot lelang				0,00	3,00	4,00	4,00
	Target				75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi wajib (Max 120%)				107,95%	118,58%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib				59,38%	65,22%	72,00%	76,00%
	Jumlah realisasi lot lelang laku				38,00	60,00	90,00	209,00
	Jumlah lot lelang				64,00	92,00	125,00	275,00
	Target				55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi HT, Paillit, dan				120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Paillit, dan Pengadialan				16,44%	15,14%	12,19%	13,75%
	Jumlah realisasi lot lelang laku				24,00	43,00	64,00	103,00
	Jumlah lot lelang				146,00	284,00	525,00	749,00
	Target				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Paillit, dan				#DIV/0!	120,00%	120,00%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Paillit, dan				#DIV/0!	66,67%	60,00%	75,00%
	Jumlah realisasi lot lelang laku				0,00	2,00	3,00	6,00
	Jumlah lot lelang				0,00	3,00	6,00	8,00
	Target				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
b	Persentase Frekuensi Lelang (60%)				20,80%	44,25%	79,42%	128,80%
	Jumlah realisasi frekuensi lelang				94,00	200,00	359,00	546,00

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2025

SS	IKU	Uraian	Polarisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Sampai dengan			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Target frekuensi lelang			452,00	452,00	452,00	452,00
		REALISASI IKU			58,07%	58,88%	90,32%	115,14%
6	Pengetahuan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	MAX/TLK	Triwulanan				
	a	Realisasi IKPA (TW I s.d TW III)			100,00	99,06	98,93	
	b	Realisasi NKA						97,86
		Realisasi IKPA (50%)						100,00
		Realisasi SMART (50%)						95,72
		REALISASI IKU			120,00	120,00	120,00	120,00
	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	MAX/TLK	Triwulanan				
		Indeks Tata Kelola Pengadaan			85,00%	86,00%	92,00%	110,60%
		SIRUP (60%)			85,00%	100,00%	100,00%	120,00%
		E-Tendering (10%)			85,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		E-Purchasing Katalog (10%)			85,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (10%)			85,00%	100,00%	60,00%	93,00%
		E-Kontrak (10%)			85,00%	80,00%	0,00%	0,00%
		<i>*TW I s.d TW III dihitung secara self assessment</i>						
		<i>**TW IV dihitung oleh ITKP dari LKPP</i>						
		REALISASI IKU			100,00	120,00	120,00	120,00
	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK	Triwulanan				
	A.	Penguatan Budaya dan Bintang Pejabat Administrator			120,00	110,00	110,00	118,00
		1) Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental (Unsur A)			120,00	120,00	120,00	116,00
		a. Nilai Pelaksanaan Kegiatan			120,00	120,00	120,00	120,00
		b. Feedback Peserta						100,00
		2) Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B)				100,00	100,00	120,00
		Nilai Kegiatan				100,00	100,00	120,00
	B.	Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan			26,43%	70,60%	95,46%	96,14%
		Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai			14,29%	65,52%	92,86%	96,43%
		1) Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP			4,00	19,00	26,00	27,00
		2) Jumlah Pegawai Aktif			26,00	29,00	28,00	26,00
		Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan			75,00%	90,81%	105,88%	105,00%
		1) Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan			3,00	10,00	18,00	21,00
		2) Jumlah Pegawai terpanggil			4,00	11,00	17,00	20,00
		REALISASI IKU			26,21%	67,30%	80,73%	96,27%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	MAX/TLK	Triwulanan				
	a.	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan			110,08	110,64	114,56	113,90
		Nilai Indeks Komponen A			93,57	94,05	97,37	96,82
		Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen A			655,00	1.975,00	1.850,00	2.130,00
		Jumlah perkara komponen A			7,00	21,00	19,00	22,00
		Target Komponen A			85,00	85,00	85,00	85,00
	b.	Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap			122,22	122,22	123,23	125,73
		Nilai Indeks Komponen B			110,00	110,00	110,91	113,16
		Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen B			770,00	770,00	1.220,00	2.150,00
		Jumlah perkara komponen B			7,00	7,00	11,00	19,00
		Target Komponen B			90,00	90,00	90,00	90,00
		REALISASI IKU			112,51	112,96	116,29	116,27
	7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX/AVG	Triwulanan				
	a	Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan		#DIV/0!				
		Jumlah Indeks Pemberitahuan Tertulis			-			
		Jumlah Permintaan			-			

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2025

SS	IKU	Uraian	Polarisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Sampai dengan			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	b	Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik			120,00			
		Indeks Ketepatan Waktu			120,00			
	c	Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website			110,00			
		Komponen Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik			100,00			
		Jumlah realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan (50%)			120,00			
		Target pemutakhiran informasi publik (50%)			120,00			
		Komponen Ketepatan Waktu			120,00			
		Indeks Ketepatan Waktu			120,00			
		REALISASI IKU			115,00	115,00	115,33	114,00
8		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	MAX/TLK	Triwulanan				
	a	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)			100,00	98,84	99,84	98,82
	b	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)			100,00	100,00	100,00	96,28
	c	Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)			100,00	90,24	97,74	95,50
		REALISASI IKU			100,00	95,69	99,05	96,73
	8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	MAX/TLK	Tahunan				
	a	Indeks Komponen I/II/III (TW I s.d TW III)			100,00	100,00	100,00	
	b	Indeks Komponen IV (Triwulan IV) Nilai LKE Level UE1 (90%) Kelulusan Level UE1 (10%) Koefisien Level Pembangunan ZI Faktor Apresiasi/Koreksi						
		REALISASI IKU			100,00	100,00	100,00	109,71

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-12
Kementerian/Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Eselon 1 : 015.09 - DIREKSI KEKAYAAN NEGARA
Wilayah/Provinsi : 22.01 - KAB. BULELENGBALI
Satuan Kerja : 525091 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 05-01-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	2.275.121.000,00	1.957.027.909,00	86,02%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.275.121.000,00	1.957.027.909,00	86,02%							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	338.960.000,00	282.573.724,00	74,51%							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	34.440.000,00	0,00	0%							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	34.440.000,00	0,00	0%							
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	22.973,000,00	0,00	0%	57,0000	Orang	57,0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	8.244,000,00	0,00	0%	21,0000	Orang	21,0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3.223,000,00	0,00	0%	8,0000	Orang	8,0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
4798	Pengelolaan Aset	304.820.000,00	282.573.724,00	82,94%							
AAH	Peraturan lainnya	160.783.000,00	142.205.276,00	88,45%							
001	Keputusan Pemohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	108.663,000,00	83.730,000,00	86,28%	45,0000	Surat Keputusan	45,0000	100%	13,74%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 45 surat keputusan dari target 45 surat keputusan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Keputusan Hasil Pengawasan/Pengelolaan Piutang Negara	52,120,000,00	48,475,276,00	93,01%	60,0000	Surat Keputusan	60,0000	100%	6,99%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 60 surat keputusan dari target 60 surat keputusan
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	14.720.000,00	13.480.000,00	91,58%							
002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	14.720,000,00	13.480,000,00	91,58%	106,0000	Rekomendasi Kebijakan	106,0000	100%	8,42%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 106 rekomendasi kebijakan dari target 106 rekomendasi kebijakan
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	21.800.000,00	20.840.000,00	96,48%							
001	Risalah Lelang	21.800,000,00	20.840,000,00	96,48%	150,0000	Dokumen	150,0000	100%	3,52%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 150 Dokumen RL dari target 150
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	63.544.000,00	38.368,197,00	60,38%							
004	Rekomendasi di Bidang Kebijakan Negara	6.408,000,00	5,626,000,00	87,8%	1,0000	Rekomendasi	1,0000	100%	12,2%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	21.280,000,00	20.409,779,00	95,91%	2,0000	Rekomendasi	2,0000	100%	4,09%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 2 Rekomendasi (Basis Data dan DKPB) dari target 2 Rekomendasi
007	Pengangan Potensi Lelang	35.858,000,00	12.332,418,00	34,39%	2,0000	Rekomendasi	2,0000	100%	65,61%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 2 Rekomendasi dari target 2 Rekomendasi
FAK	Pengelolaan Aset BUN	19.993.000,00	18.935,441,00	94,21%							
001	Aset BUN yang Dikembalikan	19.993,000,00	18.935,441,00	94,21%	5,0000	Aset	5,0000	100%	6,79%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 5 aset dari target 5 aset
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23.880.000,00	19.844,816,00	78,91%							
201	Rekomendasi RRII (Tempa Tanah yang Disertifikasikan (PT))	23.880,000,00	19.844,816,00	78,91%	204,0000	Rekomendasi	204,0000	100%	21,09%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 204 rekomendasi dari target 204 rekomendasi
WA	Program Dukungan Manajemen	1.938.161.000,00	1.704.454.185,00	88,03%							
4700	Legislasi dan Litigasi	26.790.000,00	26.269.396,00	98,00%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.790.000,00	26.269.396,00	98,00%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
969	Layanan Bantuan Hukum	26.790.000,00	26.269.396,00	98,00%	12,0000	Layanan	12,0000	100%	1,94%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 12 layanan dari target 12 layanan
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.876.959.000,00	1.665.173.335,00	88,72%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.391.130.000,00	1.216.472.634,00	87,44%							
002	Konsumsi/anggaran	153.836,000,00	121.422,779,00	78,93%	12,0000	Layanan	12,0000	100%	21,07%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO sebanyak 12 Layanan dari target 12 Layanan
994	Layanan Perkaroran	1.237.286,000,00	1.095.049.855,00	88,5%	12,0000	Layanan	12,0000	100%	11,5%	(00)	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO sebanyak 12 Layanan dari target 12 Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	485.829.000,00	448.700,701,00	92,36%							
001	Peralatan Fasilitas Perkaroran	67,070,000,00	32,600,700,00	48,61%	3,0000	Unit	3,0000	100%	51,39%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progress capaian rincian output adalah 100% dengan RVRO 3 unit dari target 3 unit
003	Kendaraan Bermotor	418,759,000,00	416,100,001,00	99,37%	1,0000	Unit	1,0000	100%	0,63%	(00)	Progress capaian rincian output adalah 100% dengan RVRO 1 unit dari target 1 unit
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	19.092.000,00	6.458.597,00	33,83%							
BMB	Komunikasi Publik	19.092.000,00	6.458.597,00	33,83%							
002	Keluhnesan	19.092,000,00	6.458,597,00	33,83%	10,0000	Kegiatan	10,0000	100%	66,17%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 10 kegiatan dari target 10 kegiatan
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Penguasaan Internal	13.320.000,00	6.552.857,00	49,2%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13.320.000,00	6.552.857,00	49,2%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	13.320,000,00	6.552,857,00	49,2%	5,0000	Dokumen	5,0000	100%	60,8%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	PCRO s.d. bulan Desember adalah 100% dengan RVRO 7 dokumen dari target 7 dokumen



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA